



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Persidangan	: I (satu)
Rapat ke	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua KPK RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 21 September 2020
Pukul	: 10.25 WIB s.d. 13.22 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Novianti, S.E.
Acara	: Membahas penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2021
Hadir	: A. Anggota DPR RI : 35 dari 51 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

4 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Dr. Ir H. Adies Kadir, S.H., M.Hum
2. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
3. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom
4. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

9 orang dari 10 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio (virtual)
2. Trimedya Panjaitan (virtual)
3. M. Nurdin (virtual)
4. Idham Samawi (virtual)
5. Bambang D.H (virtual)
6. Arteria Dahlan (virtual)
7. Marinus Gea (virtual)
8. Agustiar Sabran (virtual)
9. H. Safaruddin (virtual)

/2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos, M.Si (virtual)
2. Ir. H. Sari Yulianti, M.T (virtual)
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn (virtual)
4. Supriansa, SH., MH.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH.
2. Romo H.R Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum. (virtual)
3. Muhammad Rahul (virtual)
4. Wiyadi Wiyanto
5. Khilmi (virtual)

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si. (virtual)
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)
3. Yessy Melania, SE (virtual)
4. Ary Egahni Ben Bahat, SH. (virtual)

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.
2. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P
3. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn (virtual)

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Santoso, S.H (virtual)
2. Dr. Didik Mukrianto, S.H., M.H.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Drs. H. Adang Daradjatun (virtual)
2. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H (virtual)

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H. Arsul Sani, SH., MH (virtual)

B. Undangan:

1. Wakil Kapolri
 2. Jaksa Agung RI
 3. Ketua KPK RI
- Beserta jajarannya

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.HUM.):

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi
Salam sejahtera bagi kita semua

(suara tidak jelas)

Sehat Pak JA?

JAKSA AGUNG (Dr. ST. BURHANUDDIN, S.H., M.H.):

Alhamdulillah Bapak.

KETUA RAPAT:

Alhamdulillah jaga kesehatan Pak JA.

JAKSA AGUNG RI:

Siap Bapak siap.

KETUA RAPAT:

Kalau Pak JA senyumnya masih segar ini berarti aman masih negara ini

JAKSA AGUNG RI:

Siap-siap.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak JA.

JAKSA AGUNG RI:

Siap.

KETUA RAPAT:

Pak Jaksa Agung terima kasih.

Yang terhormat Pak Kapolri yang diwakili oleh Wakapolri beserta jajaran.

Sehat Bang Gatot?

WAKAPOLRI (Komjen. Pol. Dr. Drs. GATOT EDDY PRAMONO, M.Si.):

Selamat siang

Pak Ketua Pimpinan Pak Adies.

KETUA RAPAT:

Alhamdulillah.

WAKAPOLRI (Komjen. Pol. Dr. Drs. GATOT EDDY PRAMONO, M.Si.):

Sehat.

KETUA RAPAT:

Baik, *alhamdulillah.*

WAKAPOLRI (Komjen. Pol. Dr. Drs. GATOT EDDY PRAMONO, M.Si.):

Alhamdulillah baik-baik Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Gatot masih sehat juga kita tenang jadinya.

WAKAPOLRI (Komjen. Pol. Dr. Drs. GATOT EDDY PRAMONO, M.Si.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Aamiin.

Yang terhormat Ketua KPK beserta jajaran Pak Firli.

KETUA KPK (Komjen. Pol. Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Selamat pagi
Salam sejahtera
Sehat selalu**

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Kelihatan juga disebelahnya nih dari Dewan pengawas ya? Pak Artijo, Pak.

KETUA KPK (Komjen. Pol. Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Sekjen, saya hadir bersama Sekjen dan Kepala Biro Perencanaan Keuangan

KETUA RAPAT:

Ngeh.

KETUA KPK (Komjen. Pol. Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Ya, makasih.

KETUA RAPAT:

Oh bukan Pak Artijo? Saya pikir Pak Artijo.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Pimpinan interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak ini baru awal nanti dulu interupsinya kita baru yang terhormat yang terhormat ini.

Serta hadirin yang kami muliakan

Puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayat-Nya pada kesempatan hari ini kita bisa hadir dalam Raker dan RDP baik secara fisik maupun virtual Komisi III DPR RI dengan Mitra Kerja pada hari ini dalam keadaan sehat *wal afiat*. Dalam rangka melaksanakan rapat-rapat pada masa tatanan kehidupan PSBB dan berdasarkan Pasal 254 Ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tartib menyebutkan bahwa semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota kecuali dalam keadaan tertentu yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, dan keadaan konflik, bencana alam, serta keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional rapat dapat dilaksanakan secara *virtual* dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut laporan Sekretariat Komisi III DPR RI berdasarkan daftar hadir secara fisik dan virtual telah hadir 7 Fraksi dari 25 orang Anggota dan yang hadir di ruang Komisi III telah hadir Pak Sarifuddin Suding dari Fraksi PAN.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Siang Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kemudian hadir pula Pak Supriansa dari Fraksi Golkar.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Siap Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Hadir Pak Rano dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kemudian Bapak Didik Mukrianto dari Demokrat, tadi dari Fraksi Gerindra ada Pak Habiburokhman dan Pak Wihadi.

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H):

Ya pimpinan sekalian interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Bapak Wihadi sebelum saya ketok saya ketok dulu nanti baru interupsi ya Pak Wihadi ya. Kemudian yang lain semua melalui virtual. Dengan demikian kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maka perkenankan kami membuka Raker dan RPD pada hari ini dan rapat dinyatakan **terbuka untuk umum**.

(RAPAT DI BUKA PUKUL 10.29 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Jaksa Agung, Wakapolri, dan Ketua KPK atas kesediaannya memenuhi undangan kami pada hari ini dilakukan secara virtual. Selanjutnya bagi Anggota yang hadir secara virtual maka daftar hadir Anggota dapat dilakukan secara elektronik kehadiran Anggota tercatat dalam list partisipasi dalam aplikasi zoom. Pak Wihadi mau interupsi?

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan teman-teman Komisi III baik yang ada di fisik maupun virtual.

Sesuai ketentuan Pemerintah terhadap masalah protokol kesehatan Covid-19 dan juga tadi sudah sampaikan oleh Pimpinan mengenai masalah kehadiran fisik dan virtual. Jadi kehadiran fisik kan diatur sebenarnya 25% tapi dari DPR diatur 20%. Nah kalau melihat daripada mekanisme daripada rapat kerja hari ini seharusnya dari Mitra minimal itu ada yang hadir secara fisik kan dan dibatasi dengan tidak melanggar protokol kesehatan jadi saya

kira sebenarnya tidak, seperti ini Pimpinan daripada mitra-mitra ini yang seharusnya bisa hadir hanya satu orang, satu orang sebenarnya masih memungkinkan dengan kita masuki protokol Covid-19 ini dengan 20%.

Jadi saya kira Pimpinan ini satu hal yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk lebih lanjut bahwa rapat-rapat kerja berikutnya kita minta adanya kehadiran daripada fisik daripada mitra dengan tetap dibatasi 20%. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Wihadi, akan mengadakan itu dalam rapat-rapat raker-raker pengawasan nantinya untuk kali ini kemarin memang ada kesepakatan karena ini kan hanya pembahasan RKAKL saja jadi terkait dengan angka-angka jadi kalau pengawasan nanti akan kita lakukan seperti itu dan kami juga sudah meminta izin kepada Pimpinan DPR, Pak Wakil Ketua Pak Dasco, jadi kalau ada hal-hal yang kurang pas nanti Pak Wihadi bisa menghadap Pak Dasco langsung.

Baik Bapak Ibu

Selanjutnya mengenai tata cara pertemuan ini yaitu:

1. Penjelasan Mitra Kerja terkait penyusunan RKAKL tahun anggaran 2021 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran
2. Dialog dan tanya jawab
3. Penutup

Kami ingin mendapat persetujuan apakah rapat pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 12.30, 12.30 ya? Pak Jaksa Agung 12.30?

JAKSA AGUNG RI:

Siap.

KETUA RAPAT:

Pak Wakapolri?

WAKAPOLRI (Komjen. Pol. Dr. Drs. GATOT EDDY PRAMONO, M.Si.):

Siap Bapak.

KETUA RAPAT:

12.30 ya, baik. Pak Firli Pak Ketua KPK?

KETUA KPK (Komjen. Pol. Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

12.30 kita akan akhiri apabila lebih cepat lebih baik kalau kurang kita akan tambah waktunya.

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati

Berdasarkan penyampaian hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/11022/DPR RI/IX/2020 tanggal 17 September 2020 bahwa Kementerian Lembaga memperoleh tambahan anggaran adalah sebagai berikut:

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 9.243.300.000.000., tambahan belanja sebesar Rp 350.000.000.000. Pagu APBN tahun 2021 disetujui menjadi Rp 9.593.000.000.000.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 111.975.200.000.000, tambahan belanja sebesar Rp 150.000.000.000. Pagu APBN tahun 2021 disetujui menjadi Rp 112.125.200.000.000.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 1.055.100.000.000 tambahan belanja sebesar Rp 250.000.000.000. Pagu APBN tahun 2021 disetujui menjadi Rp 1.305.100.000.000.

Jadi pada pembahasan yang lalu pada prinsipnya Komisi III menyetujui tambahan anggaran dari Kejaksaan Agung, dari Polri dan juga dari KPK dengan harapan dengan penambahan ini kinerja-kinerja terhadap penegakan hukum semakin baik dan juga semakin bisa dirasakan oleh masyarakat.

Demikian pengantar kami kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Jaksa Agung, Wakapolri, dan Ketua KPK untuk menyampaikan penjelasannya secara bergantian. Kami persilakan dimulai dari Pak Jaksa Agung silakan Pak.

JAKSA AGUNG RI:

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Syalom

Om Swastiastu

Namo Budhaya

Salam Kebajikan

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR Republik Indonesia Serta hadirin sekalian yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas izin dan hidayah-Nya pada hari ini kita dapat

menyelenggarakan rapat kerja dengan Komisi III yang membahas mengenai penyusunan RKAKL tahun 2021.

Pada rapat kerja pada hari Senin tanggal 14 September 2020, Kejaksaan telah menyampaikan usulan tambahan ...(suara tidak jelas) di tahun anggaran 2021 yaitu sebanyak Rp 400.000.000.000 dan *alhamdulillah* telah dikabulkannya dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas tambahan anggaran ini.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati

- i. Adapun dapat kami sampaikan beberapa realisasi anggaran tahun 2019 sebagai berikut. Pertama realisasi anggaran Kejaksaan tahun 2019 sebesar Rp 6.835.567.383.798 atau 96,90% dari pagu sebesar Rp 7.053.915.662.000. Sementara realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBPNP sebesar Rp 1.575.575.966.380 atau 361,68% dari total target Rp 433.625.000.000. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-213/MK.02/2020 tanggal 18 Maret 2020 dan Nomor: S-387/MK.02/2020 tanggal 14 Mei 2020. Pertama kalinya Kejaksaan memanfaatkan sebagian dana PNBPNP diluar penerimaan denda pelanggaran lalu lintas yakni paling tinggi 25% guna biaya program kegiatan pemantaban PNBPNP diperuntukan dalam melaksanakan bimbingan teknis, pengelolaan PNBPNP untuk petugas tilang dan pejabat pengelola PNBPNP, satker, penyediaan mobil layanan barang bukti di lingkungan satker Kejaksaan Negeri Kejaksaan Cabang Kejaksaan Negeri dan penyediaan perangkat teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan sidang secara online dengan total keseluruhannya Rp 85.000.000.000.
- ii. Realisasi anggaran Kejaksaan tahun 2020.
Realisasi Kejaksaan per tanggal 18 September 2020 sebesar Rp 3.607.105.605.470 atau 54,07% dari pagu sebesar Rp 6.671.624.811.000. Realisasi anggaran PNBPNP Kejaksaan per tanggal 18 September 2020 sebesar Rp 673.037.734.828 atau 120,8% dari target sebesar Rp 556.815.787.429.
- iii. Rencana anggaran dan anggarannya Kejaksaan tahun 2021 untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan telah menerapkan 6 tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan.
 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan diukur dengan jumlah Aparatur Kejaksaan yang memiliki sertifikasi kompetensi dan atau keahlian.
 2. Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan dan integritas Aparatur Kejaksaan diukur dengan meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin.
 3. Meningkatnya peran Kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi diukur dengan jumlah kegiatan yang mendukung upaya tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi dalam setiap tahunnya.

4. Meningkatnya optimalisasi kerja Aparatur Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana diukur dengan presentase penyelesaian tindak pidana dengan penerapan prinsip *restorative justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum yang telah dinyatakan tetap dan telah dapat dieksekusi.
5. Meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara diukur dengan jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata.
6. Meningkatnya kualitas kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informatika diukur dengan jumlah kegiatan yang diselesaikan melalui IT Masterplan Kejaksaan tahun 2020-2024.

Untuk membiayai program yang telah disusun Kejaksaan tahun 2021 Kejaksaan telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan Kejaksaan tahun 2021 sebesar Rp 13.973.477.757.615. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Kejaksaan memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2021 sebesar Rp 6.957.742.483.000 atau mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 114.763.309.000 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 dengan rincian per jenis belanja sebagai berikut:

Pagu anggaran 2021 atas pagu ini indikatif yang telah disebut sebelumnya Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan perihal permintaan tambahan anggaran pada pagu 2020 yang pada intinya Kejaksaan telah meminta tambahan anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp 2.520.672.057.409. Bahwa surat Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas yang menyatakan Kejaksaan memperoleh pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 9.243.319.486.000. Pada pagu anggaran tahun 2021 Kejaksaan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 2.285.577.000.000. Adapun anggaran tersebut diperuntukan:

1. Anggaran perkara tindak pidana umum sebesar Rp 93.000.000.000.
2. Anggaran perkara tindak pidana khusus sebesar Rp 16.614.388.000.
3. Belanja modal untuk pengadaan sarana prasara sebesar Rp 2.093.385.612.000
4. Belanja modal sarana prasarana yang bersumber dari PNPB sebesar Rp 85.577.000.000.

iv. Rincian anggaran per bidang.

Anggaran Kejaksaan tahun 2021 per bidang yang dapat disusun sebagai berikut:

1. Program penegakan dan pelayanan hukum:
 - a. Bidang intelijen pusat dan daerah.
Alokasi anggaran untuk Bidang Intelejen adalah sebesar Rp 71.595.005.000 (71.595.700.000) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang intelijen baik pusat dan daerah.
 - b. Bidang tindak pidana umum di pusat dan daerah.
Alokasi anggaran untuk bidang tindak pidana umum adalah sebagai berikut Rp 282.438.535.000. Anggaran ini direncanakan akan

dipergunakan untuk kegiatan di bidang tindak pidana umum baik di pusat dan di daerah. Kegiatan tusi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan biaya penanganan perkara tindak pidana umum tahap pra penuntutan, penuntutan, dan eksekusi serta dukungan manajemen perkara satker-satker di daerah sebanyak Rp 244.593.854.000 untuk menangani 120.000 perkara dan 531 satker daerah.

- c. Bidang tindak pidana khusus pusat dan daerah.
Alokasi anggaran bidang tindak pidana khusus sebesar Rp 162.079.952.000. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan di bidang tindak pidana khusus baik di pusat dan daerah antara lain kegiatan tusi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai sebesar Rp 140.695.242.000 (145.465.564.000) yang akan dipergunakan untuk kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi sebanyak 581 perkara di 531 satker.
 - d. Bidang perdata dan tata usaha negara di pusat dan daerah. Alokasi anggaran untuk bidang perdata dan tata usaha negara adalah sebesar Rp 11.100.144.000 yang akan digunakan untuk kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara baik pusat dan daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan tusi pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di pusat dan daerah sebanyak Rp 4.040.400.000 yang akan dipergunakan untuk kegiatan pertimbangan hukum, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara serta pos pelayanan hukum sebanyak 468 kegiatan untuk 468 satker di daerah.
2. Dukungan program manajemen
- a. Di bidang pembinaan pusat dan daerah.
Alokasi anggaran di bidang pembinaan di pusat dan daerah sebesar Rp 5.159.357.209.000. Pada bidang ini mendapatkan alokasi yang paling besar dibanding bidang-bidang lain dikarenakan bidang pembinaan terdiri dari belanja pegawai, gaji, tunjangan dan makan dan uang makan seluruh satker dan belanja barang operasional rutin, kebutuhan-kebutuhan dasar untuk pelayanan perkantoran seluruh satker, pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, internet, mutasi pegawai, seragam dan lain-lain.
 - b. Belanja modal pengadaan sarana prasarana pusat dan daerah.
Alokasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana adalah Rp 3.187.402.976.000 yang merupakan anggaran belanja modal untuk pengadaan sarana prasarana seluruh satker pusat dan daerah termasuk belanja modal pada bidang pendidikan dan pelatihan. Adapun tambahan anggaran sebesar Rp 2.175.962.612.000.
 - c. Bidang pengawasan pusat dan daerah.
Alokasi anggaran untuk bidang pengawasan adalah sebesar Rp 20.237.689.000 mengalami penurunan sebesar Rp 2.232.940.000.
 - d. Badan pendidikan dan pelatihan.
Alokasi anggaran rutin untuk diklat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebesar Rp 349.107.281.000 yang digunakan

untuk anggaran berbagai kegiatan diklat pada Badiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kegiatan prioritas anggaran tahun 2021 untuk kegiatan prioritas nasional dianggarkan sebesar Rp 168.501.216.000 yang digunakan untuk berbagai kegiatan.

- v. Usulan tambahan anggaran pada pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2021.

Pada rapat kerja sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Kejaksaan telah menyampaikan usulan tambahan untuk tahun 2021 yaitu sebesar Rp 400.000.000.000 untuk pembangunan kembali fisik kontruksi listrik Gedung Utama Kejaksaan yang terbakar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. Kebutuhan pembangunan gedung utama tersebut sangat mendesak untuk dipenuhi karena kebakaran menyebabkan kerusakan berat pada bangunan gedung tempat tugas Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung.

Pimpinan serta Anggota Komisi III yang kami hormati

Demikian penjelasan tertulis yang kami sampaikan kepada Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian dalam mengabdikan kita kepada bangsa dan negara. Demikian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang penting ini Pak Jaksa Agung yang paling penting anggaran untuk penanganan pidana perdata itu yang paling penting karena kebanyakan setiap kami turun ke lapangan itu kalau di bulan-bulan Januari, Februari sampai Juni masih. Halo putus-putus, tolong teknisi putus itu, ah Pak JA dengar?

JAKSA AGUNG RI:

Terputus-putus Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya maksud saya begini jadi setiap kami turun itu kebanyakan di bawah itu Pak masalah anggaran untuk penanganan kasus-kasus pidana baik pidana umum maupun pidana khusus jadi kebanyakan itu kalau masih bulan-bulan di bawah bulan Juni masih senyum-senyum kalau sudah mulai Oktober ke atas sudah kehabisan tuh kawan-kawan tuh jadi jangan sampai di akhir tahun kendor Pak jadi mohon anggarannya tu juga diperhatikan. Mungkin itu saja Pak Jaksa Agung nanti dilanjutkan pendalaman dari kawan-kawan

setelah penjelasan dari Wakapolri dan KPK. Selanjutnya kami persilakan Pak Kapolri yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakapolri, silakan Pak.

WAKAPOLRI (Komjen. Pol. Dr. Drs. GATOT EDDY PRAMONO, M.Si.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Syaloom

Om Swastiastu

Namo Budhaya

Salam Kebajikan

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI

Para Wakil Pimpinan Komisi III DPR RI

Para Anggota Komisi III DPR RI

Yang saya hormati juga Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia serta jajarannya, Ketua KPK

Para hadirin rapat kerja yang saya muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa hari ini kita masih diberikan kesehatan diberikan kekuatan untuk bisa hadir dalam rangka rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Mitra Kerja tentang pembahasan penyesuaian RKAKL Polri tahun anggaran 2021. ...(suara tidak jelas) bisa berjalan dengan lancar dan ...(suara tidak jelas) bagi masyarakat bangsa dan negara.

Bapak Pimpinan rapat yang saya hormati

...(suara tidak jelas) RKAKL Polri tahun 2021 ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Kapolri tidak bisa hadir pada ...(suara tidak jelas) Polri tahun 2021 Beliau ada kebetulan ada kegiatan dengan Bapak Presiden sehingga mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan menyesuaikan RKAKL Polri tahun 2021. Pada kesempatan ini akan menyampaikan bahwa guna terselenggaranya program dan kegiatan usulan prioritas dalam Renja Polri tahun 2021 dan meninjau program Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi, Menteri Keuangan telah menetapkan pagu anggaran Polri tahun 2021 sebesar Rp 111.975.151.565 dengan komposisi anggaran per jenis sebagai berikut:

A. Jenis belanja terdiri dari:

1. Belanja pegawai Rp 53,977 triliun
2. Belanja barang Rp 28.707 triliun
3. Belanja modal Rp 29.290 triliun

B. Sumber anggaran terdiri dari:

1. Rupiah murni sebesar Rp 97,395. triliun
2. PNBPN Rp 8,685 triliun
3. Badan Layanan umum Rp 1,990 triliun
4. Pinjaman luar negeri Rp 2,932 triliun

5. Rupiah murni pendamping Rp 735.000.0000
6. Pinjaman dalam negeri Rp 37.000.000.000
7. SBSN Rp 191,41 miliar.

Dengan memperhatikan sasaran program prioritas pada RKP tahun 2021 dan Renja Polri tahun 2021, maka pagu anggaran Polri tahun 2021 dijabarkan ke dalam 5 program yang dilaksanakan oleh 1.413 satuan kerja di lingkungan Polri dengan rincian masing-masing program sebagai berikut:

1. Program profesionalisme SDM Polri sebesar Rp 2,401 triliun
2. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp 5,496 triliun
3. Program modernisasi almatusus dan sarana prasarana Polri sebesar Rp 37,900 triliun
4. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp 17,017 triliun
5. Program dukungan manajemen sebesar Rp 49,159 triliun

Pada penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2021 kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas sesuai surat Kapolri, Polri mengajukan tambahan anggaran Rp 19,668 triliun. Dari pengajuan anggaran tersebut hasil pembahasan Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka pembicaraan TK.I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun 2021 terdapat penyesuaian anggaran Polri sebesar Rp 150.000.000.000 dari usulan Polri yang kami sampaikan tadi sebesar Rp 19,668 triliun. Dengan demikian pagu anggaran Polri semula sebesar Rp 111.975.151.565 menjadi Rp 112.125.151.565 dengan komposisi anggaran jenis belanja sebagai berikut:

- A. Jenis belanja terdiri dari:
 1. Belanja pegawai Rp 53,977 triliun
 2. Belanja barang Rp 28,707 triliun
 3. Belanja modal Rp 29,290 triliun
- B. Sumber anggaran terdiri dari:
 8. Rupiah murni sebesar Rp 97,545 triliun
 9. PNBPN Rp 8,685 triliun
 10. Badan Layanan umum Rp 1,990 triliun
 11. Pinjaman luar negeri Rp 2,932 triliun
 12. Rupiah murni pendamping Rp 735.000.0000
 13. Pinjaman dalam negeri Rp 37.000.000.000
 14. SBSN Rp 191,41 miliar.

Nah anggaran ini dijabarkan ke dalam 5 program yang dilaksanakan oleh 1.413 satuan kerja di lingkungan Polri dengan rincian yang mengalami perubahan daripada 5 program tadi adalah program modernisasi almatusus dan sarana prasarana Polri yang semula sebesar Rp 37,900 triliun berubah menjadi Rp 38,050 triliun jadi tambahan daripada Rp 150.000.000.000 tadi. Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas maka penyusunan anggaran Polri sebesar Rp 150.000.000.000 diprioritaskan dibelanja modal untuk pengadaan peralatan pendukung, pengamanan, dan penanganan Covid-19.

Demikian Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat penjelasan kami tentang penyusunan RKAKL Polri Tahun Anggaran 2021 kami beserta seluruh jajaran Polri menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Pimpinan dan segenap Anggota Komisi III yang telah membantu Polri dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi menjaga stabilitas keamanan nasional serta memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan harapan masyarakat yang semakin meningkat. Sekian dan terima kasih.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om santi santi santi om*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Wakapolri.
Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua KPK untuk memberikan penjelasannya silakan.

KETUA KPK (Komjen. Pol. Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Izin Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi
Dan salam sejahtera bagi kita sekalian
Om Swastiastu
Syaloom
Namo Budhaya
Salam Kebajikan*

Pertama-tama yang kami hormati Pimpinan Komisi III
Anggota Komisi III baik yang hadir fisik maupun melalui virtual
Bapak Wakapolri
Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia
Rekan-rekan yang saya hormati

...(suara tidak jelas)

Pertama-tama perkenankan kami untuk menyampaikan salam hangat, salam bahagia, salam sehat selalu di dalam kondisi pandemi Covid-19 kita masih (suara tidak jelas) penjelasan ini kami ingin menyampaikan terlebih dahulu pertama adalah visi, misi, dan tugas pokok KPK sebagaimana sudah kami rumuskan dalam rencana strategi nasional KPK, Visi KPK adalah bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Hal ini sesuai dengan rencana strategi Pemerintah dan kami jabarkan dalam misi KPK diantaranya ada 4:

1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem

2. Melakukan pencegahan dengan pendidikan anti korupsi yang komprehensif
3. Pemberantasan korupsi yang efektif, akuntabel, professional, dan sesuai dengan hukum
4. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Terkait dengan itu kami sesuai dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tugas pokok KPK ada 6, antara lain:

1. Melakukan tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi
2. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan anti korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
3. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
4. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan anti korupsi.
5. Melakukan penyelidikan penyidikan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
6. Melaksanakan tindakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Terkait dengan tugas pokok tersebut maka KPK merumuskan 5 area tugas pokok, antara lain adalah:

1. Tindak pidana korupsi di bidang bisnis
2. Tindak pidana korupsi di bidang penegakan hukum dan reformasi birokrasi
3. Pemberantasan korupsi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan politik dan terutama adalah dalam pelaksanaan Kepala Daerah. Kami paham saat ini ada 270 Kepala Daerah yang sedang akan melaksanakan Pilkada 9 Desember 2020 tentulah kita ingin bersama-sama dengan seluruh anak bangsa, partai politik, para kontestan untuk mewujudkan pemilihan Kepala Daerah yang bersih bebas dari korupsi, kolusi maupun nepotisme.
4. Kita melaksanakan pemberantasan korupsi terkait dengan pelayanan publik.
5. Korupsi yang bersumber dari sumber daya alam.

Lima kegiatan KPK ini seiring dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia 2019-2024.

Bapak Pimpinan Komisi III DPR RI
Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati

Terkait dengan cara strategi pemberantasan korupsi kami mencoba merumuskan berdasarkan kajian menjadi 3 pendekatan pemberantasan korupsi.

1. Pendidikan masyarakat supaya orang tidak ingin melakukan korupsi.
2. Melakukan pencegahan dengan cara melakukan kajian dan merekomendasi untuk perbaikan sistem pada Pemerintah.

3. Pendekatan penindakan secara tegas dengan maksud supaya tidak terjadi korupsi dan tentunya meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut maka KPK mengusulkan kebutuhan anggaran 2021 pada kesempatan hari ini kami mewakili seluruh insan KPK, Dewan Pengawas KPK, Pimpinan KPK dan segenap pegawai KPK mengucapkan terima kasih atas ... dukungan Komisi III yang pada hari ini tentu kita mengetahui bersama ada penambahan anggaran tahun 2021. Semula pagu indikatif KPK Rp 955,08 miliar dan naik menjadi Rp 1.305,1 miliar pagu anggaran 2020. Hal ini tentu kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Komisi III yang terus bekerja keras memberikan dukungan kepada KPK.

Anggaran tersebut sudah kami susun sesuai dengan kebutuhan yang pertama dari anggaran Rp 1.300.000.000 kami siapkan untuk mendukung seluruh kegiatan operasional KPK.

1. Program dukungan manajemen. Program dukungan manajemen sebesar Rp 1.595 miliar.
2. Program pendidikan dan peran masyarakat hal ini menjadi penting karena ...(suara tidak jelas) ada kesadaran dari setiap pihak penyelenggara negara, pemangku kepentingan untuk melakukan korupsi dan tidak ingin melakukan korupsi maka program pendidikan masyarakat dan peningkatan peran masyarakat dianggarkan sebesar Rp 115.000.000.000.
3. Program pencegahan dan mitigasi korupsi. Kita mengenal ada mitigasi bencana alam tetapi KPK juga mengedepankan pendekatan pencegahan dan sekaligus mitigasi korupsi. yaitu upaya supaya orang tidak ingin melakukan korupsi supaya orang tidak memiliki kesempatan dan peluang untuk korupsi maka anggaran yang kami siapkan sebesar Rp 105.000.000.000.

Begitu juga dengan kegiatan penindakan. Kegiatan penindakan tidak akan pernah kami turunkan tetapi tentulah memiliki prioritas. Prioritas pertama adalah kejahatan korupsi yang merugikan negara kita berupaya untuk membangkitkan semangat untuk mencegah kebocoran keuangan negara, kita juga mengisi semangat untuk sebanyak-banyaknya mengembalikan kerugian negara atau dalam hal ini adalah *asset recovery* sehingga dukungan anggaran yang diminta oleh KPK sebesar Rp 1.881.000.000.000 dikabulkan oleh Komisi III dan Pemerintah sebesar Rp 1.305.000.000.000 atau saat ini masih ada kekurangan Rp 575.900.000.000. Namun demikian walaupun keadaan kekurangan anggaran KPK tidak akan pernah surut dalam rangka memberikan dukungan dan semangat untuk mewujudkan Indonesia maju Indonesia, Indonesia sejahtera, dan Indonesia yang cerdas.

Anggaran Rp 250.000.000.000 kami siapkan untuk mendukung seluruh kegiatan operasional sebagai berikut.

1. Operasional ke deputian pencegahan dan monitoring sebesar Rp 81.490.000.000.
2. Operasional ke deputian pendidikan dan peran serta masyarakat sebesar Rp 80.620.000.000.

3. Pengadaan sarana prasarana KPK berupa ...(suara tidak jelas) jabatan fungsional, jabatan struktural dan Bus pegawai sebesar Rp 47.790.000.000.
4. Operasional Sekretaris Jenderal Rp 15.430.000.000.
5. Penambahan dana operasional kedepuitan penindakan Rp 15.000.000.000
6. Tambahan untuk dukungan operasional kedepuitan koordinasi dan supervisi Rp 8.670.000.000.
7. Tambahan operasional kedepuitan PIPM Rp 1.000.000.000.

Perlu kami sampaikan kepada Komisi III pada kesempatan hari ini mungkin ada yang bertanya kenapa ada kedepuitan pencegahan dan monitoring, sesuai dengan tugas pokok KPK di Pasal 6a yaitu KPK melakukan mencegah supaya tidak terjadi korupsi. Pasal 6c KPK melakukan *monitoring* atas pelaksanaan program Pemerintahan. Tugas pencegahan dan monitoring ini dilakukan oleh salah satu Deputi yang *Insyallah* dalam SOTK KPK baru 2019-2024 ada Kedepuitan pencegahan dan monitoring. Hal ini dimaksudkan untuk betul-betul melakukan pencegahan dan meminimalisir pencegahan penyimpangan anggaran karena sesungguhnya tugas monitoring adalah tugas melakukan kajian, tugas dalam rangka melakukan penelitian dan penelaahan terhadap sistem-sistem yang berlaku supaya sistemnya tidak buruk sistemnya tidak lemah dan sistem tidak gagal sehingga dengan sistem baik maka korupsi itu bisa kita tutup karena pelakunya tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi.

Begitu juga dengan kedepuitan pendidikan dan peran masyarakat, ini juga kedepuitan baru tetapi *Insyallah* SOTK KPK 2019-2024 akan terwujud dan hari ini tahap sedang pembahasan dengan Kementerian Hukum dan HAM dan sudah kami bahas dengan Kementerian PAN RB. Begitu juga dengan Kedepuitan koordinasi dan supervisi sebagaimana Pasal 6B KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan juga pelayanan publik. Pasal 6D KPK melakukan supervisi karena ...(suara tidak jelas) yang berwenang melakukan pemberantas korupsi.

Saya kira kami ingin sampaikan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI dan segenap Anggota Komisi III DPR RI, kami selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat bangsa dan negara. Saya kira untuk lebih jelasnya secara lengkap sudah kami kirimkan Komisi III baik berupaya narasi maupun bahan paparan. Terakhir mengakhiri amanat acara ini kami mohon maaf lebih dan kurangnya dan mohon dukungan kepada seluruh rakyat khususnya Komisi III DPR RI. Akhir kata kami akhiri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om santi santi santi om

KETUA RAPAT:

Waalaiumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih kepada mitra kerja yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi III DPR RI untuk memberikan tanggapan maupun masukan terhadap penjelasan yang telah disampaikan, tanggapan atau pertanyaan dari Anggota Komisi III DPR RI setelah semua pertanyaan diberikan setelah itu baru mitra kerja menyampaikan jawabannya. Kami mulai dulu dari yang hadir di ruangan ini baru nanti kami berikan kesempatan kepada mereka yang hadir secara virtual. Ya kami mulai dari tadi saya lihat Pak Didik lebih dahulu mengangkat tangan, baru nanti Pak Wihadi, baru Pak Sudding, baru Pak Rano, baru Pak Supriansa ini semua yang ada ingin bertanya dalam ruangan. Silakan Pak Didik.

F-PD (Dr. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati
Para Mitra Komisi III yang kami hormati

Setelah mendengar berbagai penjelasan dari Mitra kita ini terkait dengan kebutuhan tambahan anggaran ini tentu kami Fraksi Demokrat memahami betul bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan capaian yang hasil dan pencapaian hasil yang baik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tentu politik anggaran itu juga menjadi penting. Namun pertama yang kami ingin memberikan catatan kepada ketiga mitra kami adalah bicara mengenai penggunaan anggaran tentu tidak terlepas dari transparansi dan akuntabilitas. Bicara anggaran tentu kita menginginkan dengan daya dukung amhharam yang saat ini kita bicarakan tentu harapan kita semuanya hasil atau basis kinerjanya menjadi meningkat dengan capaian-capaian yang sudah barang tentu kita harapkan secara objektif dan rasional capaian dan keberhasilan dari kinerja para Mitra Komisi III ini juga bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat secara utuh.

Kedua adalah bahwa transparansi dan akuntabilitas ni kita harapkan bukan hanya penyerapan anggaran saja namun kualitas belanja anggaran untuk masing-masing pos anggaran ini bisa menghasilkan sebuah *output* dengan ukuran yang bisa kita evaluasi dan tentu kami juga berharap kepada para Mitra kami ini kami ingin adanya ukuran-ukuran yang jelas target-target yang jelas sehingga setiap penggunaan anggaran dari tahun ke tahun dari waktu ke waktu selalu bisa dinilai dan dirasakan serta bisa kita evaluasi ke depan terkait dengan prioritas dan target anggaran berikutnya.

Kemudian yang kedua kami ingin memberikan atau meminta pendalaman terkait dengan tambahan anggaran dari Kepolisian dalam konteks ini kami sudah membaca beberapa rincian masing-masing alokasi tambahan anggaran ini dikemas dalam 5 program dan tentu kami dari Fraksi

Demokrat memahami betul kebutuhan ini dan kami mencoba memahami bahwa peruntukan anggaran ini memang ditujukan kepada kebutuhan-kebutuhan yang prioritas kedepan ini namun kami ingin mendalami satu hal terkait dengan pengalokasian tambahan anggaran untuk almatsus dan sarana prasarana dan memang di dalam target-target yang diharapkan Kapolri ini mendapatkan prioritas yang cukup besar di dalam anggaran ini hingga Rp 38,50 triliun.

Nah terkait dengan hal itu Pak Wakapolri tentu kami Fraksi Demokrat ingin memastikan bahwa tambahan anggaran ini terkait dengan sarpras ini juga betul-betul harus diarahkan kepada program prioritas dimana basis belanjanya pun harus berbasis *evaluable-evaluable* mudah dievaluasi dan kemudian juga didasarkan kepada kondisi-kondisi ataupun hal-hal yang sudah ada di Kepolisian sekarang ini. Kenapa kami sampaikan bahwa perlu dijelaskan kepada kami perlu dijelaskan kepada masyarakat sesungguhnya belanja Polri selama ini dari tahun ketahun tentu ada basis data evaluasinya dimana sarpras almatsus yang ada ini ketika kita dari tahun ke tahun menganggarkan ada penambahan tentu ini memperkuat daya dukung Kepolisian di dalam menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam konteks memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Nah untuk itu Pak tentu kami ingin kedepan Polri juga bisa secara transparan memberikan sebuah gambaran meskipun tidak terlalu detail tapi penting kepada kita urgensi ataupun target-target belanja almatsus ini apakah basisnya ini memang sebuah kebutuhan yang mendesak kita mengingat bahwa almatsus-almatsus dimana sudah Polri belanjakan di masa-masa berikutnya ni penting juga dielaborasi kepada kita semuanya kondisinya seperti apa, apakah belanja almatsus ini juga hanya ingin menambah dari kekurangan kalau kekurangan Polri ini kira-kira kekurangan seperti apa butuhnya berapa dan tentu kita juga menyadari bahwa disitu ada pemeliharaan-pemeliharaan almatsus yang sudah yang sudah dibeli gitu.

Nah untuk itu sekali lagi Pak Kapolri dalam konteks almatsus ni penting kami diberikan penjelasan ataupun perencanaan dari penggunaan ini kira-kira sampai kapan Kepolisian memang terus ingin memperkuat almatsus ini sesuai dengan mungkin kalau di TNI ada *standard essential force* gitu apakah apakah Polri juga punya konsep seperti itu kira-kira standar kebutuhan Polri terkait dengan almatsus ini posisi sekarang ini berapa dan kebutuhannya kedepan hingga sampai berapa gitu yang kami tanyakan.

Kemudian kepada Kejaksaan Agung tentu kami memahami betul Pak Jaksa bahwa memang tambahan yang diajukan Kejaksaan kemudian yang sudah mendapatkan komitmen ini kami menyadari memang kalau bicara beban dan kewajiban Kejaksaan memang rasanya mungkin belum cukup namun tentu anggaran yang belum cukup ini pun kami berharap bahwa Kejaksaan betul-betul bisa mengoptimalkan dengan mengefektifkan tambahan anggaran yang nantinya akan diberikan ini terkait dengan daya dukung tugas dan kewajiban di Kejaksaan. Kami ingin menyoroti Pak satu hal atau minta elaborasi saja terkait dengan fokus tambahan anggaran yang kemudian dialokasikan sebesar Rp 2.000.000.000.000 ini untuk pengadaan

sarana prasarana. Nah kira-kira Pak apakah sarana-prasarana ini fokus prioritasnya ini untuk fisik saja atau kemudian daya dukung yang lain. Dan berikutnya adalah kalau kita bicara pengadaan sarana prasarana ini tentu kami ingin di elaborasi lebih lanjut terkait dengan sarana prasarana seluruh infrastruktur atau struktur Kejaksaan di daerah-daerah Pak karena memang setelah kami Komisi III melakukan kunker ke berapa daerah memang kondisi-kondisi sarana prasarana jajaran Kejaksaan khususnya di daerah-daerah itu memang masih banyak sekali yang harus didukung pengadaannya bahkan di beberapa wilayah Indonesia ini banyak juga Kejari-Kejari yang hingga saat ini memang belum mempunyai kantor Pak. Nah bagaimana mungkin kalau beban tugas Kejaksaan yang sedemikian besar ini harus diemban oleh Kejaksaan namun fasilitas atau sarana prasarana kantor pun di beberapa kabupaten kota di Indonesia ini belum terpenuhi untuk itu tentu kami berharap bahwa mudah-mudahan prioritas anggaran untuk pengadaan sarana prasarana juga menyentuh daya dukung buat temen-temen di jajaran Kejari di kabupaten kota di Indonesia.

Dan saya menarik satu hal lagi terkait dengan Kejaksaan bahwa fokus atau prioritas anggaran sekarang ini dalam basis untuk peningkatan SDM dan untuk menciptakan integritas Kejaksaan. Lagi-lagi pada forum yang terhormat ini kami ingin ...(suara tidak jelas) Kejaksaan bahwa hadirnya Jaksa yang berintegritas menjadi penting ukurannya bukan hanya ukuran kuantitas saja Pak tapi ukuran kualitas ini menjadi penting begitu jangan sampai kemudian kinerja ataupun keberhasilan Kejaksaan selama ini dalam membina para Jaksa-Jaksanya secara kuantitas kemudian muncul di persepsi publik karena satu kasus yang basis kualitas publiknya cukup besar kemudian ini juga mendestruksi apa yang dicapai oleh Kejaksaan maka penting Kejaksaan menyampaikan kepada publik terkait dengan hal-hal ini karena keberhasilan Kejaksaan di dalam melakukan pembinaan peningkatan kapasitas dan integritas ini di kuping publik ini terasa dengungunya kecil sekali Pak sementara ketika Kejaksaan mendapatkan musibah dimana ada oknum Kejaksaan yang kemudian dalam perspektif kasus besar ada penyimpangan kewenangan di situ kemudian ini menjadikan ruang publik yang sangat gaduh dan kemudian seolah-olah di dengan satu penyimpangan ini mendestruksi semua keberhasilan. Nah untuk itu Pak, apapun-apapun yang terjadi tentu kita tidak boleh mentoleransi sedikitpun perbuatan-perbuatan atau penyimpangan-penyimpangan dimanapun nah untuk itu mungkin di basis pembinaan ini khususnya Jamintel mungkin lebih kuat lagi dilakukan pembinaan Pak jangan sampai ada oknum-oknum khususnya di lingkungan Kejagung yang kemudian melakukan *abuse of power* terkait dengan kebijakan ini-ini penting Pak gitu.

Kemudian yang terakhir terkait dengan KPK tentu kami sejak awal konsern terkait dengan tugas kewenangan KPK yang sedemikian besar yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia ini bahwa dengan peran dan fungsi KPK ini akan hadir Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi namun hingga saat ini ternyata fakta juga tidak bisa kita pungkiri untuk menghadirkan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi ini kita masih banyak PR yang sangat besar dan kemudian melihat anggaran yang kemudian dialokasikan oleh KPK dengan harapan yang sedemikian besar ini

tentu kami ingin di dalam politik anggaran ini terus memperkuat komitmen KPK untuk memberantas korupsi seoptimal mungkin. Ini tentu kami dari Fraksi Demokrat sepenuhnya Pak kami mendukung karena kalau melihat-melihat rincian dari Rp 250.000.000.000 yang dimintakan KPK ini saya sangat memahami betul anggaran-anggaran yang sangat relatif kecil dibandingkan dengan tugas tanggung jawab ini mudah-mudahan di dalam prioritas pemberantasan korupsi baik di dalam pencegahannya maupun juga membangun kesadaran publik serta penindakannya ini juga bisa beriring sehingga pemberantasan korupsi yang hakekatnya bagaimana kita menghilangkan potensi *loss* keuangan negara yang mengembalikan uang negara yang sudah terlanjur korupsi ini menjadi penting.

Namun catatan kami yang terakhir untuk ke-3 Mitra kita bahwa khusus di dalam pemberantasan korupsi Pak tentu kita berharap suatu waktu apakah 25 tahun lagi ataukah 50 tahun lagi dan seterusnya kita semuanya berharap tidak sudah tidak ada tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Nah untuk itu kami berharap masing-masing khususnya penegak hukumnya ada di sini ini untuk duduk bersama untuk membuat *roadmap* tunggal pemberantasan korupsi sehingga tidak ada lagi *roadmap* di KPK tidak ada lagi *roadmap* di Kepolisian tidak ada lagi *roadmap* pemberantasan korupsi di Kejaksaan. Kenapa kami berharap ada *roadmap* tunggal itu Pak? Ketika ada *roadmap* tunggal itu kami berharap dari 3 institusi penegak hukum ini berani menyampaikan publik berani menyampaikan sebuah konsep kepada pemerintah bahwa Indonesia akan bebas dan bersih dari korupsi mungkin akan dicapai dalam jangka waktu tertentu mungkin 25 atau 50 tahun ke depan dengan *roadmap* yang tunggal yang terintegritasi berkesinambungan saya yakin basis pemberantasan korupsi ini bukan hanya melakukan penindakan saja pembenahan sistem kemudian melakukan pencegahan yang lebih utuh dan sistem itu bukan hanya sistem penegakan hukum saja tapi sistem mengelola keuangan negara ini menjadi penting.

Nah untuk itu kami ingin memohon komitmen kepada ketiga aparat penegak hukum ini kira-kira kalau menurut pandangan ketiga mitra ini yakin tidak Indonesia akan bebas dan bersih dari korupsi dan itu kira-kira target waktunya kapan dengan dengan cara apa mungkin itu berkat yang kami sampaikan. Terima kasih Pimpinan.

*Akhirul Kalam Wabillahi Taufiq Wal Hidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Selanjutnya Pak Wihadi silakan.

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang terhormat Ketua Pak Adies Kadir dan Anggota Komisi III yang hadir fisik maupun virtual
Pak Jaksa Agung, Pak Wakapolri, dan Ketua KPK yang hadir secara virtual

Pada rapat hari ini kita sudah mendengar bahwa dari 14 Mitra Komisi III ini hanya 3 yang penambahan anggaran bahan anggaran itu ketiga-tiganya adalah di Polisi Kejaksaan dan KPK ini menunjukkan keseriusan dari pihak Komisi III dari DPR bahwa penegakan hukum adalah merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan secara terperinci dan juga tersecara apa namanya ada satu kekuatan dalam penegakan hukum itu nah ini kita lihat disini bahwa KEjaksaan mendapatkan tambahan kurang lebih 350 dari Rp 2.000.000.000.000 dan juga dari Rp 2.000.000.000.000 yang diminta kemarin untuk penambahan awal masih ditambahin lagi jadi 350.

Dari ketiga mitra ini ada berapa hal yang menjadi catatan kami dengan adanya penambahan-penambahan tersebut. Pertama dari pihak Kepolisian itu penambahan dari yang diberikan kepada pihak Kepolisian ada lima program yang jelas-jelas 5 program itu adalah 5 merupakan program yang merupakan 5 program yang diunggulkan untuk tahun 2021 kalau saya boleh mengatakan demikian dan salah satu hal yang pernah saya kritisi juga mengenai masalah almatsus dan sarana prasarana saya harapkan ini menjadi perhatian kita semua jangan sampai permasalahan yang mungkin dikemudian harinya beberapa hal terkait masalah vendor-vendornya.

Kemudian masalah program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat seberat 17,017 triliun. Mungkin saya sedikit melakukan sedikit pendalaman ini mengenai masalah program-program dimana pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ini karena ini kaitannya dengan kemarin yang sedikit menjadi polemik yaitu adanya pembentukan PAM Swakarsa apakah hal ini pembentukan PAM Swakarsa ini adalah merupakan dari program keamanan ini nah ini memang kami dari Komisi III tidak sampai kepada satuan tiganya Pak tetapi memang kita hanya diberikan ini dan pada saat kita ditanya beberapa permasalahan-permasalahan yang menganut masalah pamswakarsa mungkin kita akan perdalam lagi dalam hal pp tapi anggaran 17,017 ini ingin kami perjelas apakah program-program ini pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat sampai sejauh mana efektivitasnya dan apa sebenarnya urgensinya sehingga ada sekitar 17 triliun ini. Ini satu hal yang menjadi perhatian kita semua mengenai masalah program kerja daripada 5 program kerja yang diajukan pihak Kepolisian. Itu untuk Kepolisian Pak kami harapkan dengan anggaran-anggaran yang ada ini ya Polisi semakin bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat kita semuanya.

Kemudian kaitan juga dengan pihak Kejaksaan Pak Jaksa Agung Pak Jaksa Agung mendapatkan tambahan 2,285 triliun sekian dan situ masih ada 350 karena dengan adanya kebakaran Kantor Kejaksaan nah saya harapkan disini Pak Jaksa Agung saya melihat bahwa anggaran tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ini dari beberapa kali kunjungan kami dan juga dari beberapa aspirasi dari Dapil kami di Kejaksaan Negeri bahwa mereka ini kesulitan untuk masalah penanganan pidana khussus karena pidana khusus

ini dari 1 tahun hanya diberikan untuk 1 kali kasus dalam 1 tahun. Saya harapkan bahwa dengan penambahan anggaran ini walaupun saya melihatnya ini juga penambahan anggaran ini kenapa lebih rendah dibandingkan pidana umum karena kalau kita serius dalam masalah penindakan masalah penindakan masalah pidana khusus-khususnya korupsi tentunya disini ada sesuatu anggaran yang memang Kejaksaan bisa memberikan anggaran lebih karena ini permasalahannya keseriusan kita semuanya kita memberikan kepada Kejaksaan kepada Kepolisian kepada KPK ini tidak-tidak apa namanya tidak juga terlepas dari bahwa keseriusan kita memberantasan masalah korupsi. Jadi saya harapkan anggaran tindak pidana khusus ini Pak ini benar-benar diberikan kepada area-area yang memang dimana masalah-masalah korupsi itu mungkin tidak-tidak cukup dengan satu kasus saja dalam satu tahun ini saya ada beberapa hal seperti itu.

Kemudian juga masalah sarana prasarana yang sekitar Rp 2.000.000.000.000. Pak Jaksa Agung masalah sarana prasarana ini saya juga ingin memberikan satu masukan bahwa sampai sejauh mana sarana prasarana ini menjadi program Pak Jaksa Agung karena saat ini Pak yang menjadi program-programnya itu apa saja karena salah satu hal ...(suara tidak jelas) buat sarana prasarana ini saya memberikan memang ini patut diberikan kepada Kejaksaan karena kami seringkali mendengarkan keluhan-keluhan dari Kejaksaan-Kejaksaan di daerah Pak Kajari-Kajari itu banyak yang tidak punya rumah dinas ya dan seringkali rumah dinas itu diberikan ke dari Bupati nah kalau sudah diberikan oleh Bupati ini Pak ada ikatan nah bagaimana yang namanya Kejaksaan ya kan bisa memberikan satu penilaian secara apa namanya objektif kepada Bupati, Kepala-Kepala dinas ya kan apabila melakukan penyelewengan-penyelewengan dalam hal ini masalah korupsi dan segala macam kalau yang namanya rumah dinas mereka itu diberikan oleh Bupati dan ini-ini salah satu hal apa namanya jadi jangan saja sarana prasarana ini hanya dikhususkan kepada Kejaksaan Agung saja Pak jadi Jaksa Kejaksaan-Kejaksaan Negeri ini juga perlu diperhatikan dalam hal ini. Kasusnya di Dapil saya Kabupaten Bojonegoro itu dia punya tanah Pak bekas Kejaksaan lama tetapi tidak punya dana untuk membangun ke perumahan ke apa namanya Kepala Kejaksaan Negerinya sampai kepada pegawai-pegawai disitu. Nah saya kira ini salah satu contoh yang nyata sekali bahwa perlu ada kesejahteraan daripada apa namanya pihak Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri ini sehingga ...(suara tidak jelas) ini tidak terpengaruh oleh namanya Bupati-Bupati dalam mempengaruhi penilaian mereka terhadap permasalahan-permasalahan hukum.

Nah ini juga saya harapkan juga sarana prasarana yang ada di apa namanya di disiapkan ini juga saya kira satu hal yang benar-benar transparan mengenai masalah pengadaan daripada barang-barang ini semuanya. Saya kira itu untuk Kejaksaan. Dan kalau KPK Pak dari penambahan itu saya kira memang kita mengharapkan KPK untuk lebih bisa memberikan kontribusi dalam hal ini kalau saya masalah program-programnya menegani sosialisasi dan segala macam memang sosialisasi membutuhkan apa namanya suatu pendanaan ya kan jadi saya kira kita mendukung yang namanya KPK itu akan

lebih-lebih kuat dengan penambahan anggaran-anggaran yang bisa kita berikan semuanya.

Jadi akhir kata seperti itu Pak beberapa hal tambahan-tambahan kami dan beberapa hal yang menjadi masukan-masukan kami yang semoga dari penambahan-penambahan ini bisa memberikan satu kontribusi penegakan hukum khususnya penegakan hukum dalam bidang korupsi sehingga kita benar-benar secara keseluruhan kita antara DPR dengan Mitra-Mitranya bisa terjalin lebih lebih lebih sempurna lagi lah kita dalam memanggani masalah-masalah hukum di negeri kita ini. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Selanjutnya Pak Sarifuddin Sudding dari Fraksi PAN.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Anggota Komisi III yang saya hormati

Pak Jaksa Agung

Pak Wakapolri

Dan Ketua KPK serta seluruh jajarannya yang saya hormati

Assalamualaikum Warahmantullahi Wabarakatuh

Pertama tentunya saya memahami dan menyetujui paparan yang disampaikan ketiga Mitra Kerja Komisi III ya, Jaksa Agung, Kepolisian, dan KPK dalam kaitan masalah anggaran 2021. Tentunya bahwa anggaran ini ya dan juga penambahannya kita berharap bahwa dalam konteks pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ketiga Mitra Kerja Komisi III betul-betul mengedepankan sikap dan tindakan yang profesional akuntabel sehingga kehadiran aparat penegak hukum ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat saya kira intinya di situ. Nah dari paparan yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung ya ada 6 program ya yang di paparkan tadi meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya akuntabilitas, meningkatnya peran Kejaksaan dan upaya ...(suara tidak jelas) dan seterusnya dan seterusnya ada catatan saya ada poin 3 ya dalam kaitan menyangkut masalah pencegahan tindak pidana korupsi Pak Jaksa Agung kita berharap memang bahwa kedepan ini upaya pencegahan memang lebih penting namun tidak menyurutkan juga bahwa upaya penindakan itu juga harus dilakukan ya karena kita semua paham bahwa sekarang ini cukup banyak persoalan-persoalan atau kasus-kasus dalam konteks penyalahgunaan anggaran negara baik yang ada di pusat maupun di daerah. Nah banyak persoalan-persoalan yang di daerah yang tidak tertangani dengan baik ya karena menyangkut masalah anggaran penanganan kasus korupsi ini seperti yang disampaikan tadi hanya satu kasus dalam setahun sementara masih banyak kasus-kasus lain yang juga harus ditangani oleh kawan-kawan di daerah namun anggarannya tidak mencukupi untuk itu.

Ya saya ambil contohlah misalnya di Dapil saya di Sulawesi Tengah ada keluhan kawan-kawan ya di jajaran Kejaksaan Tinggi cukup banyak sebenarnya persoalan ya penyalahgunaan anggaran yang ada di Sulawesi Tengah ini namun anggarannya sangat terbatas mereka menyampaikan hanya satu penanganan kasus tindak pidana korupsi sementara banyak kasus-kasus lain yang memang juga harus ditangani nah saya kira ini juga menjadi catatan perhatian Pak Jaksa Agung agar anggaran-anggaran dalam kaitan menyangkut masalah penanganan kasus tindak pidana korupsi di daerah di Kejaksaan-Kejaksaan Tinggi ini menjadi perhatian ya jangan sampai banyak kasus-kasus yang tidak tertangani karena hanya persoalan anggaran yang terbatas. Itu yang pertama.

Yang kedua Pak Jaksa Agung ya tentang karena tadi disampaikan bahwa biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi pencucian uang perpajakan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 140.000.000.000 kurang lebih dengan 581 perkara di 531 satker di daerah. Saya kira ini anggaran dengan apa namanya masih sangat minim sebenarnya ya ketika melihat cakupan penanganan perkara dalam kaitan masalah korupsi pencucian uang perpajakan dan kepabeanan. Kemarin ya kita menelusuri tentang persoalan kepabeanan bea dan cukai yang terjadi di Jawa Timur ternyata persoalan ini juga terjadi di beberapa daerah-daerah lain Pak Jaksa Agung nah saya kira peranan intel-intelijen ya yang ada di Kejaksaan Tinggi ini yang juga sering koordinasi dengan pihak Bea Cukai namun dalam pelaksanaannya ini masih sangat lemah ya bahkan ada beberapa katakanlah para importir-importir ini ya masih terjadi hengky pengky dengan kawan-kawan yang ada di aparat penegak hukum nah ini yang apa ada persoalan sebenarnya ya dan saya minta agar Pak Jaksa Agung bisa betul-betul melakukan suatu tindakan bagaimana agar meminimalisir ya terjadinya importir-importir ilegal ini di beberapa pelabuhan-pelabuhan.

Katakanlah seperti kejadian di Jawa Timur kemarin importir barang yang termasuk dalam negara kita itu berasal dari Cina tapi ternyata itu singgah di Malaysia dan seakan-akan ada apa ada pemalsuan dokumen barang itu berasal dari Malaysia sehingga itu menurunkan bea masuk kan begitu kenapa ini terjadi karena memang ada pusat logistik berikat yang dicabut ya selama ini sehingga ini tidak sehingga barang-barang yang dari luar ya misalnya dari Cina dan sebagainya yang beanya per kontainer itu Rp 1.000.000.000 lebih ya Rp 1.200.000.000 ya yang harus dibayar tapi hanya dibayar ratusan ribu nah saya kira ini menjadi perhatian supaya barang-barang yang masuk ke negara kita betul-betul mendapatkan apa mendapat pendapatan negara ya sesuai darimana impor barang itu berasal. Nah saya kira sedapat mungkin dihidupkan kembali menyangkut masalah pusat logistik berikat itu supaya yang lebih jelas darimana barang itu berasal sehingga ini menambah pendapatan negara.

Pak Jaksa Agung saya kira di beberapa daerah juga kita juga masih sangat perihatin ya melihat kondisi seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tentang sarana dan prasarana apalagi ketika daerah itu adalah hasil pemekaran yang memang ketika dalam konteks penanganan perkara itu sangat jauh ya sehingga biaya-biaya perkara pun terkadang mengalami

kesulitan dialami kesulitan oleh kawan-kawan pada saat melakukan proses yustisia ya dalam kaitan penanganan perkara. Nah ini juga menjadi perhatian agar sarana prasarana terhadap daerah-daerah pemekaran ini itu sedapat mungkin itu menjadi perhatian untuk segera dialokasikan anggarannya menyangkut masalah Kejaksaan-Kejaksaan Negeri ya yang ada di beberapa daerah yang sampai saat ini belum-belum ada. Nah itu yang untuk Pak Jaksa Agung.

Lalu kemudian untuk Kepolisian Pak Wakapolri ya saya memberikan dukungan penuh terhadap politik anggaran ini ya walaupun penambahan anggaran yang sangat minim hanya Rp 150.000.000.000 dari usulan tambah dari usulan yang disampaikan namun sedapat mungkin anggaran Rp 112.000.000.000 ini lebih efektif karena kita juga sangat memahami bahwa tugas-tugas Kepolisian cukup besar apalagi menghadapi Pilkada serentak ini ya saya kira sama dengan pihak apa Pak Jaksa Agung tadi bahwa proses penyelidikan penyidikan tindak pidana ya hanya Rp 5.000.000.000.000 lebih ya sementara kalau kita melihat di beberapa daerah justru kasus-kasus yang menonjol itu sungguh sangat besar Pak Wakapolri jadi perkembangan penanganan kasus di daerah ini cukup sangat besar ya dan karenanya penyelidikan penyidikan tindak pidana ya apakah itu tindak pidana umum apakah tindak pidana khusus ya sedapat mungkin ini dialokasikan sehingga kawan-kawan juga di daerah tidak mengalami kesulitan pada saat melakukan penanganan perkara.

Dari 5 program yang disampaikan tadi ya saya kira yang paling kecil adalah program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ya dibanding dengan almatsus, lalu kemudian keamanan dan ketertiban dan juga dukung manajemen sementara tugas pokok ya salah satu tugas pokok Kepolisian yang dalam Undang-Undang 2 Tahun 2002 adalah konteks penegakan hukum kan begitu ya sehingga anggaran 5 koma triliun ini sedapat mungkin itu menjadi perhatian agar ditingkatkan supaya pada saat kawan-kawan melakukan penanganan perkara tidak ada permainan antara pihak pelapor atau pihak terlapor ya karena ini menyangkut masalah profesionalisme dalam hal penanganan perkara yang dilakukan oleh kawan-kawan di tingkat penyidikan.

Nah yang berikutnya menyangkut masalah sarana dan prasarana sama dengan Pak Jaksa Agung tadi bahwa masih banyak daerah-daerah hasil pemekaran ya ya katakanlah juga di Dapil saya karena kita juga sangat merasakan bahkan sampai di tingkat Polsek ya yang tidak terpenuhinya tentang sarana dan prasarana ini bahkan di tingkat Polsek di daerah Sulawesi Tengah ini masih ada 3 kecamatan di cover oleh 1 Polsek nah ini kan menyangkut masalah efektivitas ya masalah efektivitas apa namanya penanganan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam konteks pelayanan terhadap masyarakat begitu pula beberapa daerah yang hasil pemekaran juga belum ada Polresnya ya saya kira ini juga menjadi perhatian Pak Wakapolri dalam kaitan menyangkut masalah sarana dan prasarana yang ada di daerah Sulawesi Tenggara. Pada prinsipnya saya memberikan dukungan penuh ya terhadap program yang disampaikan oleh jajaran

Kepolisian semoga kedepan betul-betul Polisi yang profesional Polisi yang modern dan terpercaya ya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Lalu kemudian terakhir dengan KPK betul bahwa ke depan kita sangat berharap bahwa fungsi pencegahan dikedepankan namun saya juga berharap bahwa fungsi penindakan juga jangan kita surutkan kan begitu kalau melihat anggaran dari yang disampaikan oleh KPK dalam kaitan menyangkut masalah penindakan apa operasional kedepan penindakan hanya Rp 15.000.000.000 ya lalu kemudian dalam kaitan menyangkut masalah Korsub yang koordinasi dan supervisi ya Rp 8.670.000.000 sementara banyak kasus-kasus ya yang baik yang ada di Kepolisian maupun yang ada di Kejaksaan baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah itu membutuhkan koordinasi dan supervisi kan begitu, begitu pula dalam kaitan menyangkut masalah di Deputi Penindakan saya kira saya sangat berharap bahwa KPK masih seperti KPK yang dulu ya betul-betul kita tidak mentolerir Pak Firli dalam kaitan menyangkut masalah penyalahgunaan anggaran apa dan siapa pun yang melakukan itu saya kira kita berharap KPK untuk tetap melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang KPK. Saya kira itu Pimpinan, makasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Sarifuddin Suding dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Kami persilakan Pak Rano dari Fraksi PKB.

F-PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmantullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati
Mitra Komisi III yang saya banggakan dan saya hormati
Ada Pak Jaksa Agung, Pak Ketua KPK, Pak Wakapolri yang saya hormati beserta jajarannya.

Yang pertama izinkan saya membahas awal terkait tentang anggaran di KPK pertama saya ucapkan terima kasih Pak Ketua KPK atas paparannya tentang penyesuaian anggaran KPK tahun 2021 yang sangat baik dan komprehensif. Dan izinkan saya juga mengapresiasi KPK yang terhadap serapan anggaran di 2019 yang sangat baik serta susunan anggaran 2021 yang cukup baik dan proporsional. Pak Ketua izinkan saya juga sampaikan bahwa kami Partai PKB atau Fraksi PKB mengucapkan juga selamat atas penambahan anggaran walaupun mungkin tidak maksimal tapi anggaran KPK tahun ini sudah mencapai Rp 1.300.000.000.000 semoga dengan penambahan anggaran tersebut aktivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi negara kita yang dapat ditingkatkan dengan baik.

Ada yang saya soroti Pak Ketua terkait anggaran tentang alokasi anggaran untuk Deputi Pencegahan dan Monitoring *sorry* Pimpinan, ini sebetulnya sangat penting kalau saya lihat Pak Ketua KPK apalagi dengan proses pencegahan ini dalam waktu 6 bulan saja Pak Ketua katakan bahwa sudah mengembalikan keuangan negara kurang lebih Rp 10.000.000.000.000 dan menambah pendapatan daerah sekitar Rp 80.000.000.000.000 berarti 6 bulan saja kinerja pencegahan ini sudah hampir Rp 90.000.000.000.000 ini luar biasa dan mudah-mudahan dengan Pak Ketua harus bisa paparkan lebih jelas sebetulnya anggaran tentang pencegahan ini sangat penting juga di luar dari anggaran tindakan karena masyarakat ingin tahu kenapa tidak ada tindakan dari KPK misalnya OTT dan lain-lain Ketua juga harus bisa jabarkan ternyata dengan pencegahan pun memang apa penyelamatan anggaran negara lebih banyak apalagi ini penambahan anggaran daerah juga luar biasa saya pengen tahu juga bagaimana KPK mendorong anggaran daerah bisa bertambah. Itu untuk KPK.

Yang kedua saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Wakapolri yang sudah memaparkan terkait program anggaran yang sangat baik walaupun memang tadi disampaikan kawan-kawan bahwa anggaran yang diminta Polri sekitar 19 T tapi yang baru di dapat atau dikabulkan adalah 150M memang tidak cukup besar tapi saya yakin bahwa kinerja Polri pasti akan tetap maksimal untuk itu Fraksi PKB mendukung membantu Polri dari berbagai macam sisi sebagai salah satu aparat untuk penegakan hukum di Indonesia. Ada sedikit yang sedikit kita soroti Pak Wakapolri ini terkait anggaran tentang profesionalisme SDM Polri yang dianggarkan Rp 2.400.000.000.000 sebetulnya anggaran ini menurut kami cukup kecil dibandingkan dengan urgensi kepentingannya karena kami lihat bahwa Polri harus lebih berwajahku humanis dan berorientasi kepada kesejahteraan kebawah karena gini Pak Wakapolri kami ada satu contoh bahwa masih ada saja oknum-oknum aparat yang bertindak sewenang-wenang dalam hal proses perlindungan Kamtibmas baik itu secara fisik seperti saat adanya demonstrasi maupun adanya penggusuran-penggusuran lahan. Nah mudah-mudahan dengan anggaran ini dan mudah-mudahan dan bisa ditambah nanti ke depan agar Polri lebih bisa menjadi Polri yang modern tercipta berdasarkan kompetensi dan kinerja optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas. Jadi saya berharap Pak Wakapolri atau Pak Kapolri nanti bisa lebih memperhatikan SDM anggotanya di bawah. Nah ini mudah-mudahan saya yakin Polri menjadi tangguh berwibawa dan akan terwujud apabila didukung oleh personil yang profesional. Itu untuk Pak Wakapolri.

Untuk Pak Jaksa Agung, terima kasih paparannya Pak Jaksa Agung bahannya sangat lengkap runut dan mendetail. Yang pertama saya ingin mengapresiasi kinerja anggaran Jaksa Agung pada tahun 2019 sudah sangat baik ini menunjukkan keseriusan Jaksa Agung dalam hal serapan anggaran, itu yang pertama. Alhamdulillah juga ini saya lihat tambahan Jaksa Agung ini tertinggi itu Rp 2.000.000.000.000 mudah-mudahan ini berkat dukungan Pimpinan yang ada di depan saya ini dan kawan-kawan Anggota ditambah lagi tadi Rp 350.000.000.000.000 untuk apa bangun gedung dan mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan dengan baik oh Rp 350.000.000.000

triliun banyak juga Pimpinan. Mudah-mudahan anggaran kedepan Rp 350.000.000.000.000 Pak Jaksa Agung.

Sedikit saya sorotin Pak Jaksa Agung ini terhadap anggaran penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait tindak pidana sebesar Rp 9.829.000.000 yang ini masuk bagian dari kegiatan prioritas nasional tahun 2021 kenapa kita Fraksi PKB menyoroti ini adalah karena maraknya kasus kejahatan keuangan baik perbankan maupun investasi menuntut saya harapkan Jaksa Agung untuk melakukan pemulihan-pemulihan aset yang nantinya aset tersebut akan masuk dalam penerimaan anggaran negara jadi anggaran ini sangat bermanfaat dan memang kebutuhan hari ini sangat penting sekali Pak Jaksa Agung karena saya yakin sesungguhnya tujuan dari penegakan hukum baik sekarang kasus TPPU maupun Tipikor tidak hanya menghukum seseorang tapi juga harus bisa mengembalikan keuangan negara, mengurangi kerugian perekonomian negara, dan yang paling penting sebetulnya kalau ada uang-uang masyarakat yang memang dirugikan dari persoalan apa hukum terhadap kasus-kasus korupsi tapi menjadi hak masyarakat harus bisa dikembalikan Pak Jaksa Agung dan mudah-mudahan dengan adanya anggaran terhadap pembangunan kembali kantor Kejaksaan Agung mudah-mudahan kinerja Kejaksaan Agung bisa lebih optimal dan baik. Terima kasih sekali lagi bahwa kami Fraksi PKB Komisi III selalu mendukung tiap-tiap kinerja maupun anggaran Mitra-Mitra kami baik KPK, Polri maupun juga Kejaksaan Agung. Terima kasih banyak mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Selanjutnya kami persilakan Pak Supriansa dari Fraksi Partai Golkar.

F-PG (SUPRIANSA, S.H. M.H):

Terima kasih Ketua Adies.

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmantullahi Wabarakatuh*

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati baik yang langsung maupun virtual
Yang saya hormati Mitra Kerja Komisi III Pak Jaksa Agung, Pak Ketua KPK, dan Pak Wakapolri

Pertama-tama saya menyampaikan bahwa kami dari Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya menyetujui semua pagu anggaran dan tambahan

yang telah disampaikan para Mitra tadi namun ada beberapa pendalaman-pendalaman yang akan saya sampaikan kepada ketiga Mitra Anggota Komisi III. Pertama adalah untuk Pak Wakapolri saya membaca dan mendengarkan secara seksama tadi lagi-lagi saya katakan bahwa anggaran yang telah diajukan ini proporsional dan tersusun dengan baik dan bisa dipahami dan dimengerti namun ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mesti memang patut juga saya akan menyampaikan kepada Pak Wakapolri.

Pertama bahwa kalau kita melihat sumber anggaran yang telah ada dalam laporan ini naskah yang ada di hadapan saya terlihat bahwa Kepolisian ini ada anggaran-anggaran yang terdiri dari rupiah murni PNBK kemudian Badan Layanan Umum, pinjaman luar negeri, rupiah murni pendamping, pinjaman dalam negeri memang disini ada agak jauh pinjaman luar negeri Rp 2.900.000.000.000 dan pinjaman dalam negeri Rp 37.000.000.000 dilunasi saja Pak itu supaya tidak lagi utang-utang kita dalam negeri. Yang ingin saya sampaikan Pak Wakapolri yang sebagaimana yang terjadi dalam berita-berita di tengah-tengah masyarakat banyak yang mempersoalkan soal baju pamswakarsa yang sebagaimana Undang-Undang atau Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 disitu dijelaskan tentang Pamswakarsa dimana bajunya direncanakan mirip-mirip dengan baju Polisi apakah sudah pernah dipikirkan bahwa Pak Wakapolri kemarin-kemarin ini kan sedangkan dia jauh dari model-model baju dengan Polisi kadang-kadang ada di temukan *security* atau satpam yang bertindak seakan-akan Polisi ada dua kemungkinannya menakut-nakuti masyarakat dan ada juga mungkin hal-hal lain itu Pak Wakapolri ini patut juga kita sampaikan karena biasa kejadian seperti itu jangan sampai Pak Wakapolri ini bertindak seakan-akan ini mumpung kalau kira-kira bisa mencegah terjadinya tindak pidana atau kriminal tetapi kalau dia sendirian tidak bisa menahan godaan sehingga seakan-akan bertindak sebagai Polisi lalu mendapatkan sesuatu dari masyarakat itu yang patut di apa namanya itu yang patut diantisipasi kira-kira dilapangan. Pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar untuk anggaran Kepolisian sangat rasional sekali dan tidak kami temukan sesuatu yang sangat mendasar untuk menjadi masalah dan kami terima itu.

Yang kedua untuk Pak Jaksa Agung lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung bahwa ini di dalam drafnya yang saya terima disini ada anggaran bidang pendidikan dan pelatihan itu Rp 349.000.000.000, Rp 349.000.000.000, kemudian ada bidang pengawasan oh hanya Rp 20.000.000.000 nah yang ingin saya dialami bahwa jangan sampai karena pengawasan anggarannya memang sedikit sehingga ditemukan banyak kadang-kadang Jaksa bertindak sendiri-sendiri memainkan perang sendiri sehingga bisa merusak citra institusi Kejaksaan itu sendiri katakanlah kemarin kasus Pinangki kemudian Joko Tjandra yang masuk di wilayah kita dimana dianggap lemahnya intelijen Kejaksaan. Anggaran di Kejaksaan saya lihat disini Rp 71.500.000.000 nah apakah anggaran ini sudah dipertimbangkan matang-matang sehingga bisa bermain betul kawan-kawan di Kejaksaan untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam rangka terutama dalam menghadapi buronan-buronan Kejaksaan itu sendiri. Saya menyampaikan ini Pak Jaksa Agung ini dalam rangka untuk mengantisipasi supaya tidak terulang lagi sebagaimana kasus-kasus yang mencuat dalam 1, 2 bulan

terakhir ini. Itu, pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar catatan kami dari Fraksi Partai Golkar tidak kami temukan dan menganggap juga bahwa apa yang Bapak usulkan ini beserta seluruh jajaran Fraksi Partai Golkar menerima usulan ini.

Kemudian yang terakhir Pimpinan KPK pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar juga untuk anggaran yang diajukan oleh Pimpinan KPK beserta seluruh jajaran sangat rasional namun ada tentu ada pertanyaan-pertanyaan sedikit misalnya Pak Firli pencegahan dan monitoring itu bisa mencapai Rp 81.000.000.000, kemudian operasional penindakan itu hanya Rp 15.000.000.000 ada agak jauh jaraknya dari pencegahan dan monitoring itu Rp 81.000.000.000 dengan dibandingkan dengan biaya operasional penindakan tapi lagi-lagi kami dari Fraksi Partai Golkar memahami dan sangat memberi dukungan kepada Bapak-Bapak dari KPK dalam rangka lebih baik melakukan pencegahan lebih baik kita mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dibanding dengan membiarkan korupsi dulu baru kita tangkap kami memahami itu dan Fraksi Partai Golkar memberi dukungan penuh soal itu. Namun ini memang perlu juga dipertanyakan upaya publik juga bisa memahami karena ini diketahui disiarkan secara langsung keluar.

Pada kesimpulannya ketiga mitra kerja kita pada hari ini Kamisi III Pak Kepolisian, Pak Kejaksaan, KPK kami menggaris bawahi bahwa semua anggaran yang telah diusulkan baik dari pagu dan tambahannya kami menyatakan dari Fraksi Partai Golkar menerima dengan baik dan memberikan dukungan sepenuhnya selamat bekerja kepada seluruh mitra kerja Insya Allah mari kita saling menguatkan tidak saling melemahkan. Terima kasih Pimpinan. Lebih dan kurangnya dimaafkan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Selanjutnya kami ke kawan menawarkan kepada kawan-kawan Komisi III yang mengikuti melalui virtual apakah ada yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan kepada mitra kerja kita kami persilakan kami tawarkan ... (suara tidak jelas) kawan-kawan virtual

F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):

Adang Daradjatun. Adang Daradjatun.

KETUA RAPAT:

Angkat tangan kalau ada. Oh ya Pak Jenderal Pak Adang Daradjatun tolong dicatat Bu Novi, Pak Taufik Basari juga.

F-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum, L.L.M):

Taufik Basari.

KETUA RAPAT:

Pak Taufik Basari oke. Pak Arsul Sani?

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Arsul Sani ya.

KETUA RAPAT:

Oke Pak Arsul Sani. Ada lagi yang lain? Cukup oke ini dulu.
Kami persilakan Pak Adang Daradjatun silakan Pak.

F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):

Baik.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi

Kami dari Partai Keadilan Sejahtera secara umum dengan seksama tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, Jaksa Agung, maupun KPK pada dasarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan Pagu dan penambahan kami menyetujui. Ada beberapa hal yang sedikit saja saya ingin mendengarkan penjelasan karena dari beberapa teman tadi sudah cukup banyak pertanyaan saya hanya menyampaikan gabungan saja antara Jaksa Agung dan Kapolri khususnya masalah yang berhubungan dengan Kapolri program peningkatan profesionalisme dan sumber daya manusia dan Jaksa Agung juga masalah Badiklat. Selama ini memang tantangan masa depan semakin berat dan pada umumnya kita merasakan anggota-anggota yang di lapangan itu ada kesenjangan dalam pada saat mereka keluar dari pendidikan dasar lalu setelah beberapa lama kemudian tidak lagi mengikuti kursus-kursus sehingga masalah-masalah profesionalisme agak ketinggalan. Nah oleh karena itu, kami ingin mendengarkan dari Kapolri dan Jaksa Agung langkah-langkah apa dari dana yang terus terang saja tidak besar sehingga masalah profesionalisme sumber daya baik itu Polri maupun Kejaksaan Agung dapat menimbangi kemajuan-kemajuan masalah-masalah kriminalitas pada saat ini.

Yang kedua untuk KPK saya tertarik bahwa masalah-masalah pencegahan menjadi utama tetapi saya menitipkan dan tolong jawaban juga terutama masalah-masalah yang berhubungan tadi disampaikan dengan sumber daya alam karena masalah-masalah korupsi yang sering dikenal dengan kejahatan kerah putih itu uteras terang saja sampai saat ini belum ada hal yang begitu besar yang berhasil. Nah kami titip bahwa KPK sebagai lembaga yang sangat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan tindakan

maupun pencegahan terhadap korupsi saya ingin mendengarkan terhadap masalah-masalah kejahatan kerah putih ini apa yang persiapan oleh KPK. Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Jenderal Purnawirawan Adang Daradjatun. Kemudian kami persilakan yang terhormat Bapak Taufik Basari dari Fraksi NasDem.

F-NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Baik, terima kasih Pak Pimpinan Pak Adies.

Yang saya hormati Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, Pak Ketua KPK.

Tadi saya sudah mendengarkan semuanya saya umum saja kami dari Fraksi NasDem tentu memberikan dukungan yang penuh terhadap penambahan pagu ini yang kita harapkan dapat semakin meningkatkan dan mengoptimalkan kerja-kerja ketiga institusi penegakan hukum ini tapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan ya yang pertama-tama adalah untuk Kejaksaan Agung kita kan saat ini sedang mempersiapkan RUU Kejaksaan yang akan membuat Kejaksaan semakin apa besar kewenangannya yang oleh karena itu butuh ada peningkatan kapasitas terhadap personel-personel Kejaksaan. Oleh karena itu, menurut saya fokus anggaran terhadap peningkatan kapasitas ini harus diperhatikan Pak Jaksa Agung karena dengan adanya peningkatan atau penambahan kewenangan tentu kita berharap personel-personel pun juga siap dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan tersebut. Jadi itu catatan pertama saya untuk.

Yang kedua untuk KPK saya juga mengapresiasi dengan strategi ... terkait dengan fokus pada pandemi. Oleh karena itu, saya juga menginginkan agar anggaran-anggaran terkait dengan bagaimana membangun institusi yang bersih di negeri ini juga bisa difokuskan jadi tidak terlalu banyak ... KPK kalau menurut saya malah sebenarnya mestinya lebih lagi yang diberikan cuman karena memang kita punya keterbatasan anggaran ya dengan tambahan pagu ini saya sudah cukup lah saya harapkan bisa digunakan dengan secara efisien ya.

Untuk Polri Pak Wakapolri saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah sempat dipaparkan dalam rapat sebelumnya yakni soal pembentukan Polres-Polres baru ya termasuk juga Polsek-Polsek baru. Saya ingin membawa aspirasi dari Dapil saya terkait dengan persiapan ...(suara tidak jelas) Polres di Pesisir Barat pecahan dari Polres Lampung Barat yang yang sekarang sudah berjalan prosesnya mungkin juga bisa diberikan perhatian terhadap anggarannya. Kemudian juga ada ada permintaan dukungan terhadap apa penguatan untuk Polres Pringsewu yang baru saja dibentuk yang juga masih kurang personelnnya jadi masih harus dibantu oleh Polres-Polres lain. Dan juga kemudian di Lampung in Dapil saya Lampung Pak Waka, di Lampung juga sedang ada pembangunan Markas

Brimob ya di Tanggamus ya mohon juga agar bisa ada perhatian anggarannya agar bisa diselesaikan dengan segera.

Dan yang terakhir terkait dengan pembangunan Polres Lampung Selatan yang beberapa waktu lalu terbakar habis sehingga harus dibangun kantor yang baru saya mohon juga ada perhatian dari Polri terhadap pembangunan-pembangunan tersebut khususnya dalam hal anggaran. Demikian Pimpinan terima kasih saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Taufik Basari. Selanjutnya kami persilahkan yang terhormat Saudara Arsul Sani.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang
salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Pak Jaksa Agung
Bapak Ketua KPK
Dan Pak Wakapolri beserta seluruh jajaran

Pertama-pertama atas nama Fraksi PPP kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas presentasi yang tadi telah disampaikan pada rapat kerja anggaran sejak pagi ini. Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan yang pertama soal Polri ya yang boleh dibilang Polri ini selalu mendapatkan tambahan anggaran pada setiap tahunnya. Pak Kapolri kami mengharap ya dalam rangka meningkatkan sosok Polisi yang promotor (professional modern dan terpercaya) ini maka capaian-capaian kinerja Polri ini bisa kemudian disampaikan kepada masyarakat secara luas sebagai bagian dari transparansi Kepolisian Negera Republik Indonesia. Nah saya selalu mengapresiasi kalau dalam soal capaian kinerja dan transparansi itu adalah apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang hampir yang boleh dibilang setiap tahun menyampaikannya dan kemudian bisa diakses oleh Kapolri secara luas tentang hal-hal yang secara keseluruhan telah dilakukan oleh Polri sebagai bentuk ...(suara tidak jelas) realisasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahunannya tetapi juga pembinaan personel dan juga apa capaian-capaian tupoksinya tugas pokok dan fungsinya khususnya di bidang penegakan hukum dan apa penjajaan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) nah saya berharap ini bisa dimasukkan Pak Kapolri bisa diwujudkan kedepan ya karena ini untuk mengimbangi bahwa di tengah masyarakat kita seolah-olah kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai Polri itu belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu catatan umum saja.

Nah yang kedua untuk Pak Jaksa Agung, Pak Jaksa Agung tadi saya mendengarkan presentasi Jaksa Agung. Saya melihat bahwa terkait dengan kebakaran gedung Kejaksaan juga sudah dianggarkan, saya mohon penjelasan apakah ini nantinya akan menjadi anggaran tahun jamak atau hanya dengan anggaran yang tadi kalau tidak salah 350an miliar itu itu gedung itu akan berdiri kembali ya. Nah saya belum mendapatkan gambaran juga dari apa yang disampaikan juga oleh Pak Jaksa Agung itu kan anggaran untuk fisik gedungnya bagaimana dengan *supporting system*-nya yang akan ada dalam gedung itu kemarin juga gedungnya terbakar habis. Ini mohon penjelasan.

Yang kedua Pak Jaksa Agung dengan tidak bermaksud untuk masuk ke dalam satuan tiga ya kami juga mohon penjelasan kebijakan anggaran kok lagi-lagi ...(suara tidak jelas) sampaikan oleh teman-teman Komisi III lagi dari apa yang kami dengar sebagai katakanlah keluhan-keluhan dari Kejaksaan di beberapa daerah yang besarnya anggaran penanganan perkara. Nah apakah Kejaksaan Agung ya terutama untuk tahun ini dan juga tahun kedepannya ini masih menganut apa kebijakan anggaran pukul rata per perkara sekian misalnya perkara Tipikor ya tanpa melihat demografi dari wilayah Kejaksaan itu dimana misalnya apa Kejaksaan Negeri yang satu itu kalau disidang begitu jauh sampai ratusan kilo meter dan lain sebagainya dibandingkan dengan ...(suara tidak jelas) kami mohon penjelasan dari Pak Jaksa Agung karena saya kira kalau belum sepenuhnya diterapkan kebijakan anggaran pukul rata, sama rata sama rasa kedepan memang ini yang kira harus ...(suara tidak jelas) pemikiran kita bersama teman-teman Kejaksaan ada di daerah-daerah Timur jauh infrastrukturnya pas-pasan untuk melaksanakan tugas-tugas penegakan dengan baik tanpa mencari kemudian anggaran-anggaran perkara-perkara yang dipergunakan ya dimainkan "dipergunakan untuk apa mendukung katakanlah apa proses-proses penegakan hukum diperkara lainnya".

Yang berikutnya untuk Pak Ketua KPK dan jajaran disatu sisi tentu saya ikut bahagia bahwa Pimpinan KPK yang sekarang berani mengajukan tambahan anggaran ini saya kira tradisi baru ya yang memang apa saya kira patut diapresiasi, namun saya terus terang Pak ...(suara tidak jelas) Pak Firli ada sedihnya juga kalau lihat paparan anggaran Bapak saya lihat di program pemberantasan tindak pidana korupsi maka terjadi penurunan presentase luar biasa antara anggaran antara DIPA 2020 ya dibandingkan dengan pagu indikatifnya apalagi dengan anggarannya yang sudah turun tahun 2021 terjadi penurunan 45,93% ya nah saya agak bingung ini ya koor bisnisnya KPK itu kan pemberantasan tindak pidana korupsi baik dalam kasus pencegahan maupun penindakan ya nah ini kok anggarannya malah turun ya disatu sisi terjadi kenaikan anggaran 200,3 miliar tapi anggaran untuk koor bisnisnya tidak turun. Ada ruang tambahan anggaran dilihat dulu di luar yang untuk pelaksanaan dukungan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis itu 100 tetapi ini pun bukan untuk program pemberantasan tindak pidana korupsi.

Nah saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana kemudian fokus kebijakan anggaran ini akan diarahkan dalam konteks terutama penindakan

perkara korupsi. Lagi-lagi apa meskipun pendalamannya nanti di dalam RDP kami ingin menekankan agar kasus-kasus perkara tindak pidana korupsi yang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat ada 18 yang pernah kami sampaikan ini hendaknya menjadi fokus jangan kemudian sudah anggarannya turunkan dan yang dikerjakan adalah perkara yang bahasa publiknya *jarah remeh-remeh*. Saya kira itu dari kami Poksi PPP Pak Ketua sekali lagi terima kasih.

Billahi Taufiq Wal Hidayah Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Arsul Sani. Ada lagi dari kawan-kawan virtual? tidak ada? Tolong layarnya ditampilkan yang dari kita ini siapa tahu masih ada lagi nanti. Rapat saya perpanjang dulu 15 menit ya untuk sementara rapat kita perpanjang 15 menit setuju? baik, rapat kita perpanjang 15 menit kalau tidak ada lagi dari kawan-kawan virtual kami persilakan Mitra Kerja untuk menjawab masih ada waktu masing-masing 5 menit kita mulai dari Pak Jaksa Agung silakan Pak Jaksa Agung.

JAKSA AGUNG RI:

Baik Bapak, terima kasih.

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak yang terhormat kami itu dapat mensimpulkan bahwa yang pertama adalah masalah anggaran prasarana dan sarana prasarana di daerah yang masih memprihatinkan itu yang pertama. Yang kedua anggaran biaya penanganan perkara yang sangat minim dan ini juga terima kasih untuk perhatiannya dari Bapak-Bapak semua yang ketiga adalah sumber daya manusia dengan tentunya dengan kami akan menyampaikan ...(suara tidak jelas)

Yang pertama adalah dari Pimpinan tadi Bapak Adies Kadir yang menyampaikan bahwa penanganan perkara biaya perkara memang benar sekali Bapak untuk perkara Pidum itu kami anggarkan 120.000 yang sebenarnya di dalam *real* yang ada adalah sangat banyak lebih dari itu perkaranya sehingga memang di akhir-akhir tahun itu penanganan biaya yang semakin minim dan tentunya ini akan menjadi perhatian kami dan terima kasih untuk dukungannya tentunya kami tahun-tahun berikutnya juga kami akan datang mencoba dan agar teman-teman di daerah tidak menjadi suatu permasalahan karena biaya yang kurang ini. Demikian juga dengan biaya penanganan perkara korupsi yang hampir rata-rata adalah satu satker itu satu padahal satker satu satker ada yang lima, ada yang empat, ada yang tiga dan ini menjadi suatu pemikiran kami juga kedepan moga-moga dapat kami penuhi apa yang diharapkan oleh daerah dan karena tidak ada biaya akan memperlemah tekad dari teman-teman di daerah untuk mengungkap adanya perkara tindak pidana korupsi. Itu yang dari Bapak Pimpinan Pak Adies Kadir.

Kemudian Pak Didik kami juga mengucapkan terima kasih Pak untuk dukungannya dan ini juga sama dengan prasarana dan kualitas SDM kami selalu meningkatkan apa yang menjadi tujuan kami adalah menjadi suatu Jaksa yang professional tentunya yang ber utamanya adalah Jaksa hanya yang berintegritas kami memang tidak membutuhkan Jaksa yang hanya professional saja tetapi yang kami butuhkan adalah Jaksa yang professional tetapi berintegritas itu yang selalu kami tekankan kepada teman-teman.

Kemudian di dalam kemudian untuk ...(suara tidak jelas) Pak Wihadi ini anggaran juga sama Bapak jadi kami mohon dukungan-dukungan dari semua pihak demikian juga dengan adanya rumah-rumah dinas masih kita juga kadang-kadang mentergantungkan kepada Pemerintah Daerah memang betul sekali Bapak tapi InsyaAllah kedepan kami selalu menganggarkan bahwa ini 122 ini juga adalah untuk dalam rangka sarana prasarana untuk di daerah dan kami mengharapkan juga kedepan agar tidak ada lagi kami mendapat pinjaman atau mungkin ada hibah dari daerah dari Pemerintah Daerah dan karena ini akan mempengaruhi tekad dari teman-teman ada ewuh pakewuh dari teman-teman kalau menangani perkara sekarang kita dipinjam mobil dipinjam tempat untuk kerja, untuk tinggal dan itu juga pasti dikit pasti ada-ada *ewuh pakewuh* mudah-mudahan kedepan ini dengan dukungan dari Bapak-bapak untuk sarana prasarana daerah itu dapat ditingkatkan Insya Allah kedepan apa yang diharapkan oleh kita bersama dapat kita capai.

Kemudian untuk Pak Sudding benar sekali Bapak bahwa kerja sama biaya perkara biaya perkara sangat-sangat memprihatinkan Bapak karena khusus untuk penanganan perkara ...(suara tidak jelas) banyak teman-teman di daerah yang dapat ...(suara tidak jelas) tetapi biaya ...(suara tidak jelas) tapi *Insya Allah* itu juga tidak akan menyurutkan-menyurutkan teman-teman semangatnya dan ini sudah-sudah kita lakukan dan saya yakin kedepan dengan dukungan juga Bapak-bapak dapat kami meningkatkan biaya penanganan perkara kita sadar bahwa dalam satu pengungkapan perkara itu tidak sedikit kami memerlukan suatu dana, tenaga dan tentunya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini dapat mungkin kita harus mendatangkan ahli-ahli dan itu memerlukan biaya dan ini sangat memang sangat meresahkan teman-teman di daerah bahwa memerlukan suatu dana yang cukup untuk pelaksanaan ini untuk itu mohon tetap juga dukungan dari Bapak-bapak sekalian.

Kemudian untuk Pak Rano ini terima kasih juga untuk saran pendapatnya dan tentunya ini tetap menjadi lebih baik.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Pimpinan interupsi Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Jaksa Agung sebentar Pak Jaksa Agung, Pak Jaksa Agung.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, bentar dulu kita stop dulu Pak.

JAKSA AGUNG RI:

Pak Supriansa benar sekali Bapak bahwa...

KETUA RAPAT:

Pak Jaksa Agung kita stop dulu Pak Jaksa Agung.

JAKSA AGUNG RI:

Dua puluh miliar. Waktu-waktu ini memang Bapak dengan adanya Covid-19

KETUA RAPAT:

Pak Jaksa Agung.

JAKSA AGUNG RI:

Kami diklatnya, kami diklatnya sedikit memerlukan suatu dana karena ada pendidikan jarak jauh yang menggunakan.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Pak Jaksa Agung, interupsi Pak Jaksa Agung, interupsi Pak Jaksa Agung. Iya, izin. Dalam kaitan penanganan perkara di daerah Pak Jaksa Agung ya.

JAKSA AGUNG RI:

Izin Bapak.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Jadi tidak hanya sebatas modal semangat Pak Jaksa Agung.

JAKSA AGUNG RI:

Ya.

KETUA RAPAT:

Tapi yang dibutuhkan itu integritas ya ketika tidak didukung dengan anggaran yang memadai saya kira integritas kawan-kawan juga akan terganggu gitu bagaimana mungkin bisa melakukan satu penanganan kasus yang baik ya mengungkap suatu kasus korupsi yang baik ketika didukung dengan anggaran yang memadai ya kan begitu ya.

JAKSA AGUNG RI:

Siap.

KETUA RAPAT:

Nah ini persoalan di daerah bahwa dalam alokasi anggaran dari jajaran Kejaksaan Agung ke daerah-daerah itu hanya satu penanganan perkara ya korupsi anggaran setiap tahunannya nah sementara di daerah cukup banyak kasus-kasus yang apa yang penyalahgunaan anggaran dalam kaitan menyangkut masalah korupsi itu tidak tertangani dengan baik nah disinilah akan muncul persoalan ketika tidak ada dana yang memadai lalu kemudian ada persoalan korupsi yang terjadi di daerah maka terjadilah *hengky pengky* disitu maka terjadi kompromi kan disitu. Nah itu yang sama sekali kita tidak harapkan.

Nah saya berharap seharusnya anggaran penanganan kasus-kasus korupsi yang ada di daerah itu itu dialokasikan lebih besar ketimbang dengan ya katakanlah masalah IT tadi dianggarkan persoalan IT apa segala macamnya ya sedapat mungkin karena tugas pokok Kejaksaan itu kan dalam konteks penegakan hukum dalam kaitan menyangkut masalah penanganan kasus.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Sudding subtansinya sudah masuk itu, sudah subtansinya udah. Silakan Pak Jaksa Agung langsung dijawab.

JAKSA AGUNG RI:

Izin Pak Sudding memang benar sekali Pak integritas memang sangat-sangat diperlukan dan kami mengalokasikan dana ini Bapak nanti kalau daerah nanti di satu daerah kelebihan dana mungkin tidak terpakai dananya itu kami bisa *switch*-kan untuk pembiayaan dana di daerah tertentu itu nanti diatur demikian oleh bidang masing-masing dan memang benar sekali Bapak biayanya sangat-sangat minim dan itu kedepan kami akan usahakan terus sehingga penanganan di daerah ini tidak terhalangi oleh hanya biaya perkara walaupun kami selalu katakan pada teman-teman saya butuh orang yang punya integritas tetapi kalau ...(suara tidak jelas) Bapak sampaikan itu tidak hanya integritas saja tetapi memerlukan suatu biaya penanganan dan ini menjadi suatu perhatian kami maka setiap tahun kami menambah melakukan penambahan-penambahan dan pembiayaan sekarang adalah menggunakan

zona nah jadi tidak sama satu tidak terbagi rata satu daerah misalnya sekian dananya satu daerah sekian dananya tapi sekarang kebutuhannya adalah per zona jadi tiap daerah berbeda penanganan perkaranya. Itu yang kami lakukan Bapak.

Kemudian untuk Pak Supriansa itu yang benar sekali Bapak jadi ini kami pendidikan-pendidikan memang lagi kami fokuskan apalagi dengan kondisi yang pandemi ini jadi kami memerlukan sangat memerlukan tambahan-tambahan biaya. Kemudian untuk pengawasan itu yang 20 M memang itu sangat kecil dan tapi kami akan usahakan itu karena pengawasan ini ada inspektorat Bapak inspektorat sebenarnya dalam si manajemen bahwa pengawasan itu adalah faktor yang penting pengguna pelaksanaan ini tetapi memang kami akan terus melakukan penambahan-penambahan sehingga apa yang diharapkan oleh teman-teman bagaimana memuat pengawasan itu akan tercapai.

Kemudian untuk Pak Adang sistem pelayanan jarak jauh ini proses belajar karena ini juga mengenai SDM proses penanganan penyidikan sekarang menggunakan pendidikan jarak jauh karena kami dilarang untuk melakukan pendidikan yang sifatnya menggumpalan orang-orang jadi kami juga sedikit memerlukan suatu biaya yang ...(suara tidak jelas) kita tetap di daerah pendidikan lakukan pendidikan-pendidikan terus terutamanya bagaimana meningkatkan profesionalisme dan integritas ini maka sedikit pada tambahan untuk biaya untuk pendidikan ini dan tentunya nantikan selalu kita evaluasi karena si jaraknya menggunakan vidcon menggunakan virtual yang sedikit kita akan evaluasi kemudian apakah ini efektif apa tidak.

Kemudian untuk Pak Taufik tentang RUU tentunya kami tetap akan terus melakukan penambahan ilmu pengetahuan atau mungkin tidak ada tidak ada jadi tidak hanya tergantung apakah kita akan ada tambahan kewenangan atau tidak yang pasti kami akan berusaha untuk melakukan penambahan ilmu pengetahuan sehingga Jaksa itu yang betul-betul professional dan punya integritas sehingga di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dapat betul-betul mengabdikan kepada masyarakat.

Kemudian untuk Pak Arsul biaya tambahan untuk gedung itu memang baru untuk gedung fisiknya saja 350 dan itu juga belum dihitung oleh PU karena baru hari ini Kementerian PU sedang melakukan inspeksi menghitung apakah gedung ini bisa digunakan lagi atau tidak itu jadi masih menunggu pengembangan dari Kementerian PU. Kemudian itu juga belum termasuk nanti adalah interior mungkin **wobbler**-nya itu belum termasuk yang 350 adalah sarana untuk fisik dan fisik juga itu belum pasti karena Kementerian PU belum dapat menghitungnya.

Kemudian untuk biaya penanganan perkara yang Bapak sampaikan betul sekali kami ada menggunakan zonasi Bapak pihak wilayah demografis jadi setiap daerah tidak sama biayanya untuk daerah tertentu karena memang sangat berpengaruh apa daerah-daerah tertentu yang dipedalaman pasti akan sangat sulit bahkan untuk memanggil saksi ahli saja dari daerah itu sangat memerlukan dana yang besar dan untuk itu daerah jadi tertentu

adalah menggunakan zona demografis. Demikian Bapak mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang kami siap kami laksanakan masukan-masukan dari Bapak-Bapak semua adalah merupakan suatu supporting dari kami agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas ini secara benar dan tentunya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Baik, terima kasih Pak Jaksa Agung.
Kami persilakan Pak Wakapolri.

WAKAPOLRI (Komjen. Pol. Dr. Drs. GATOT EDDY PRAMONO, M.Si.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Polri. Yang pertama pertanyaan dari Pak Didik terkait dengan ya kami berterima kasih sudah menyampaikan apresiasi hasil kerja daripada Polri. Pertanyaan Beliau adalah terkait dengan capaian-capaian kinerja bukannya sebagai target serapan tetapi sebagai ...(suara tidak jelas) penggunaan anggaran struktur secara jelas.

Kemudian juga tambahan anggaran untuk almatsus dan sarpras harus berbasis penggunaan evaluasi dan berbasis data ... (suara tidak jelas) kebutuhan yang mendesak atau hanya ingin menambah kekurangan. Jadi ingin kami sampaikan pada Pak Didik bahwa di dalam menyusun anggaran Polri khususnya di dalam pengadaan ...(suara tidak jelas) atau terkait dengan anggaran sarpras kami sudah menyusunnya dengan menyusun yang namanya MEPE (*minimal essential p equipment*) jadi sudah dihasilkan disitu memang ...(suara tidak jelas) yang dibuat 5 tahun tapi MEPE ini baru kita susun selama 5-6 bulan jadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di tahun 2021 tentunya mengacu kepada prasarana dan pengadaan-pengadaan ...(suara tidak jelas) yang sudah ada.

Kemudian kita lihat yang rusak kemudian memang masih dipergunakan dan mana yang baru kita ...(suara tidak jelas) hari itu kita pesan semuanya dari kondisi-kondisi yang ada selama 5 tahun tahun 2021 kebutuhan kita apa 2022 sampai dengan 5 tahun kedepan itu yang kami sudah buat tapi kedepan kita akan merencanakan membuat itu selama 25 tahun pada *roadmap* per 5 tahunan tentunya ini sudah kita lapor Pak, jadi kita tidak tidak mengadakan berdasarkan mencukupi kekurangan yang ada saja maksud direncanakan secara matang dalam bentuk ...(suara tidak jelas) dan *roadmap* yang ada.

Kemudian dari Pak Wihadi menyampaikan terkait dengan 5 program unggulan berkaitan dengan ...(suara tidak jelas) menjadi perhatian kita semua. Kemudian terkait Kamtibmas apakah berkaitan dengan pembentukan

Pam Swakarsa satu program ini sudah sejauh mana efektivitas tingkat urgensinya. Kami sudah jelaskan tadi kepada Bapak sama dengan dari Pak Didik tadi bahwa terkait dengan program kita yang berkaitan dengan almatsus ini memang kita kalau kita lihat disitu ada 38 koma sekian triliun tapi sebenarnya Pak dari 38 koma triliun itu ada 8,5 triliun merupakan program tahun yang 2020 sehingga untuk 2021 yang sekitar 29 koma sekian triliun. Nah ini kita gunakan diantaranya tentunya untuk pembelian-pembelian memang sarana prasarana diperlukan berupa baik itu almatsus maupun materil seperti pembangunan-pembangunan Polres baru jadi kami laporkan kepada Bapak juga bahwa pada tahun 2021 semua Polres yang ada pembangunannya kita akan melaksanakan pembangunannya termasuk nanti ada Polsek-polsek itu akan diajukan oleh para Kapoldanya Polsek mungkin bisa semuanya tapi untuk Polres kami sudah merencanakan semua Polres yang terbentuk nah yang belum ada ya mungkin satu Polres membawahi 2 kabupaten atau atau gabungan kabupaten kota untuk tahun depan untuk 2021 kita sudah melakukan pembangunan semuanya.

Kemudian juga untuk Harkamtibnas ini ...(suara tidak jelas) Pam Swakarsa ini kami jawab sekaligus tadi juga ada pertanyaan sebelumnya dari Pak Supriansa juga terkait Pam Swakarsa ini jadi kami jelaskan secara historis bahwa lahirnya satpam itu telah membantu Polri dalam mengemban tugas Kepolisian terbatas kalau secara yudisnya kita bisa melihat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kemudian PP nya Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Korwas Pembinaan Khusus PPNS dan Perpol Nomor 4 2020 tentang Pam Swakarsa.

Nah tentunya mengapa memasukan ini ke dalam satu peraturan Kepolisian nah ini merupakan penjabaran sebenarnya daripada Undang-Undang Nomor 2 itu sendiri. Kemudian pertanyaannya ada juga tadi Pak Supriansa juga menanyakan kenapa kok pakaiannya sama sebenarnya kita(suara tidak jelas) kondisional dalam upaya membangun sinergitas antara Polri dan Satpam sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas, kemudian juga membangun kebanggaan dan kemuliaan profesi Satpam sebagai pengemban Kepolisian terbatas, kemudian menciptakan efek jera dan(suara tidak jelas) dengan pemilihan Satpam di masyarakat. Kemudian tadi apakah mungkin tidak ada kemungkinan mereka bisa melakukan tindakan sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan padahal tugasnya adalah tugas Kepolisian yang terbatas.

Nah oleh karena itu, dalam hal ini Polri sudah melakukan langkah-langkah antisipasinya adalah yang pertama Polri telah membangun aplikasi BOS (*Binmas Online System*) yang berisi data tentang BUJT, data Satpam dan sistem pelaporan sehingga kita mengetahui ...(suara tidak jelas) apa kita bisa mengetahui secara langsung. Kemudian Satpam juga dibentuk pelatihan dan diberikan ijazah ...(suara tidak jelas). Nah sistem kerja Satpam diatur itu ...(suara tidak jelas) oleh BUJT nanti Polri akan supervisi, ...(suara tidak jelas), dan melakukan monitoring dan evaluasi dan audit ada BUJP nya apabila memang ada pelanggaran-pelanggaran dan mereka tidak mampu mengendalikan tentunya nanti ada sanksi-sanksi yang akan diberikan pada ...(suara tidak jelas).

Kemudian kami juga sekaligus menjawab ...(suara tidak jelas) ada perbedaan sebenarnya yang cukup mendasar daripada seragam Satpam dari seragam Polisi dari pertama itu dari label nama, nomor register ...(suara tidak jelas) berwarna warna putih kemudian berbeda dengan Kepolisian, emblem, bet, kerah baju, tanda kewenangan, pin, kode satpam, tanda kepangkatan, ...(suara tidak jelas), ini juga berbeda tentunya di dengan yang ada di Polri. Kalau di Polri tu di apanya tribrata mereka menggunakan betnya seperti satpam punya, pangkatnya juga tentunya tidak menggunakan pangkat-pangkat Polri itu pangkatnya adalah yang mereka miliki sesuai dengan yang sudah diatur di dalam Peraturan Kepolisian. Kemudian warna bajunya juga itu mereka lebih terang dengan gradasi 35% ini yang-yang sudah kita ...(suara tidak jelas) nya tentunya kami berterima kasih masukan daripada Pak Didik dan Pak Supriansa terkait satpam ini tentunya ...(suara tidak jelas)

Pak Wihadi terkait dengan satpam dan Pam Swakarsa, Pam Swakarsa ini kami ingin menambahkan sedikit kepada Pak Wihadi tentunya ini adalah suatu pengamanan yang datang dari masyarakat itu sendiri juga kesadaran masyarakat disamping tadi satpam untuk lingkungan tentunya juga di masyarakat terkenal namanya siskamling, kalau ...(suara tidak jelas) seperti di daerah ...(suara tidak jelas) tujuannya semata-mata adalah pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, masyarakat ikut berpartisipasi tidak ada tujuan lain daripada itu.

Selanjutnya yang pertanyaan selanjutnya yang dari Bapak H. Sarifuddin Suding, terima kasih Pak Bapak ...(suara tidak jelas) anggaran Polri kemudian proses sidik tindak pidana beberapa daerah baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus telah diatur oleh instansi ...(suara tidak jelas) sehingga ...(suara tidak jelas) daerah terima kasih memang kami akui Pak anggaran penyidikan Polri masih menggunakan sistem ...(suara tidak jelas) ada yang sulit, sulit, yang kasus berat dan sedang ...(suara tidak jelas) mengalami suatu hambatan ...(suara tidak jelas) kadang juga bisa mencukupi maka kadang-kadang kalau kasus ... sangat ...(suara tidak jelas) sulit tapi kemudian cukup dan sebagainya maka Rp 40.000.000 itu berlebih Pak(suara tidak jelas) Rp 20.000.000 sehingga anggaran(suara tidak jelas) kita revisi kita gunakan anggaran intern memang tidak terdukung.

Kemudian untuk hal pemerataan tentunya proses penganggaran di Polri itu secara *bottom up* jadi menerima dari Polsek terlebih dahulu ke Polres, Polres membuatnya diajukan ke Polda, Polda diajukan di Mabes Polri sehingga memang sudah kita susun secara *bottom up* dan tidak *top down* sehingga memang sudah sesuai dengan kebutuhan daerah walaupun kalau kita hitung berdasarkan kebutuhan anggaran yang untuk penegakan hukum ini masih kurang kalau kita lihat itu tentunya kita ...(suara tidak jelas) menggunakan sistem *add cost* tapi tentunya kalau sistem *add cost* ya ini akan memberatkan anggaran negara kita dan kita belum mampu untuk itu.

Kemudian terkait dengan banyaknya daerah hasil pemekaran tidak terpenuhi sarana prasarannya di Sulteng tadi seperti Bapak ...(suara tidak

jelas) ada 3 (tiga) kecamatan yang di cover oleh satu Polsek nanti kami akan koordinasikan ini Pak ke Poldanya nanti supaya diusulkan tentunya nanti semua Polda itu mengusulkan ...(suara tidak jelas) kemudian ada beberapa Polres yang diampu ini 2 (dua) kabupaten yang di ampu oleh satu Kapolres ini ditempat Bapak dari data saya sudah masuk ini Pak untuk wilayah Sulteng itu tadi ada Polres baru Pos Induknya itu Polres Morowali Utara nanti Polres barunya dibagi Pak ada dua itu, ada Polres Morowali nanti ini mudah-mudahan ini bisa, ditempat Dapil Bapak tentunya. Kemudian untuk sarana prasarana lain itu akan mengikuti Pak di Kapolres baru nanti tentunya personel kemudian juga perlengkapan-perengkapannya nanti Pak Sena akan menyusun untuk itu dan nanti kami akan sampaikan ke Pak..

Kemudian untuk Pak Rano terkait dengan disini untuk ...(suara tidak jelas) tingkat urgensinya masih banyak arogansi personel terkait dengan program-program profesionalisme. Nah kami ingin menyampaikan kepada Bapak sebenarnya Polri itu sedang melakukan perubahan-perubahan juga perubahan yang kita lakukan mungkin disini Pak Adang ada awalnya Beliau ketika waktu itu ada jadi Wakapolri juga ...(suara tidak jelas) reformasi kita reformasi structural. Nah reformasi struktural itu harus kita jalankan dan dalam pendidikan-pendidikan Polri kita sudah memasukan ...(suara tidak jelas) itu bagaimana di dalam dipemeliharaan Kamtibmas untuk meminimalisir terjadinya kekerasan fisik seperti dalam penanganan unjuk rasa.

Kemudian dalam penegakan-penegakan juga ... tindakan-tindakan ... karena itu kita juga dalam bidang pendidikan terus meningkatkan profesionalisme ...(suara tidak jelas) *abuse of power* ...(suara tidak jelas) Bapak sampaikan tadi, ketika di lapangan kita melakukan pengawasan-pengawasan baik itu pengawasan melekat oleh Pimpinannya langsung maupun pengawasan oleh satker yang diberikan tugas pengawasan di bidang ...(suara tidak jelas) dan tentunya juga Pak Irwasum sehingga arogasi atas kewenangan itu bisa diminimalisir.

Kemudian tadi yang pertanyaan dari Pak Supriansa sudah saya jawab tadi, kemudian dari Pak Adang Daradjatun menanyakan berkaitan dengan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Polri untuk mengimbangi tingkat kriminalitas yang terjadi jadi begini Pak kita mengetahui bahwa pembentukan Polri itu yang pertama pembentukan-pembentukan pendidikan pembentukan, yang kedua pendidikan pengembangan, kemudian juga ada pendidikan pendidikan untuk ...(suara tidak jelas) Polri tersendiri. Nah ketika anggota sudah mendapatkan pendidikan pembentukan Bapak menyampaikan terkadang anggota ini jarang mendapatkan pendidikan-pendidikan tambahan lainnya nah tentu memecahkan persoalan tersebut Pak kalau kita hanya mengacu kepada pendidikan-pendidikan yang sudah ada yaitu untuk meningkatkan kapasitas *building* kita mempunyai Pendidikan Reserse di Lembang, Pendidikan Pusat Intelijen, kemudian Bimas, kemudian Brimob ...(suara tidak jelas) tentunya dengan jumlah anggota yang ada sangat terbatas di ...(suara tidak jelas). Oleh karena itu, agar kebijakan baru yang ...(suara tidak jelas) pergungan untuk pendidikan-pendidikan untuk meningkatkan ...(suara tidak jelas) baik itu bidang pembinaan maupun bidang operasional sudah mulai berjalan sejak tahun 2020 ini Pak mungkin untuk

tahun 2021 kita akan ...(suara tidak jelas) lagi sehingga anggota akan *up to date* terus dengan perkembangan situasi utamanya menghadapi tantangan ...(suara tidak jelas) yang semakin berkembang.

Kemudian dari Pak Taufik Basari disini pembentukan Polres dan Polsek baru terkait dengan Polres Pesisir Barat, kemudian dukungan Polres ...(suara tidak jelas) baru dibentuk sebagai kurang personelnya termasuk Mako Brimob dan pembangunan Polres Lampung Selatan Pak jadi kami lihat disini Pak kalau Lampung itu tahun 2020 itu ada 2 Polres Pak memang yang akan kita buat baru, Polres Tulang Bawang Barat dan Polres Pringsewu Pak Taufik kita akan ...(suara tidak jelas) tahun 2021 tentunya.

Kemudian pembangunan Mako Brimob nanti kami akan perhatikan kembali kami akan cek nanti disana apakah masih ada kekurangan anggaran atau tidak ...(suara tidak jelas) Selatan terbakar habis tadi saya cek ke Pak Sena katanya belum dapat laporan Pak nanti kami akan lihat untuk penganggarnya kalau memang tidak ada tahun depan tahun berikutnya kami akan anggarankan untuk Polres Lampung Selatan.

Kemudian kepada Pak H. Arsul Sani menyampaikan dalam rangka meningkatkan ...(suara tidak jelas) sebenarnya kami sudah menyampaikan Pak setiap akhir tahun itu Pak Kapolri menyampaikan rilis kepada masyarakat rilis itu sampaikan terbuka pada wartawan kemudian juga tadi mungkin kalau pingin lihat ada di Humas itu apa namanya web-nya humas disitu kita menyampaikan capaian-capaian apa yang sudah kita sampaikan baik itu capaian di bidang pembinaan maupun di bidang operasional tentunya, operasional itu baik di bidang penegakan hukum pemeliharaan Kamtibmas kemudian juga upaya ... publik ini kita sampaikan secara rinci tapi nanti kalau memang ada masih ada kurang tentunya ini akan kami lebih optimalkan kembali masukan dari Pak Arsul Sani lebih transparan dan akuntabel terhadap ...(suara tidak jelas) Polri.

Demikian Pak yang bisa kami sampaikan kalau memang ada yang kurang-kurangnya kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada Bapak Adies. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H):

Baik, terima kasih Pak Wakapolri atas penjelasannya.
Dari meja Pimpinan sebelum kita persilakan Ketua KPK.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Pimpinan kok diambil alih.

KETUA RAPAT:

Perpanjangan waktu 10 menit. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, saya persilakan ke Ketua KPK untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Anggota Komisi III. Silakan Pak.

KETUA KPK (Komjen. Pol. Drs. FIRLI BAHURI, M.Si.):

Baik.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Perkenankan kami untuk mencoba memberikan penjelasan atas beberapa pertanyaan kami tidak akan menyebut satu persatu pertanyaan itu berasal dari Pimpinan ataupun Anggota Komisi III tetapi kami akan berupaya semaksimal mungkin memberikan penjelasan secara komprehensif.

Yang pertama, KPK di dalam melaksanakan pekerjaan ataupun program ini didasarkan kepada rencana strategi KPK 2019-2024 yang meliputi visi misi program sasaran strategi lima fokus area dan tiga strategi pemberantasan korupsi tentu kami tidak ingin mengulang apa yang sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya strategi pemberantasan korupsi dijabarkan dalam 3 (tiga) program dan sekian kegiatan yang juga dirumuskan dalam kebutuhan anggaran.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi III yang hormati

Sebagaimana tujuan reformasi birokrasi adalah melakukan supaya tidak terjadi korupsi kolusi dan nepotisme, meningkatkan kapabilitas dan kapasitas aparatur negara, serta meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah begitu juga landasan berfikir daripada KPK dalam rangka menyusun program anggaran tahun 2021.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati

Program KPK dalam rangka pemberantasan korupsi disusun dengan cara dengan perpegangan pada prinsip transparan dan akuntabel serta kinerja disasarkan kepada pemanfaatan yang sebesar-besarnya ...(suara tidak jelas). Selanjutnya tiga programnya yang dilakukan KPK dalam rangka pemberantasan tindak korupsi yang meliputi pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan. Kenapa tiga program ini yang kami kedepankan karena sesungguhnya tiga *striker* ini lah yang kami pakai dalam rangka memberantas korupsi tidak hanya pendekatan penindakan tetapi juga harus dibarengi dengan ...(suara tidak jelas) dan sekaligus supaya pendidikan masyarakat. Tentu kami ingin mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela bahwa Beliau katakan pendidikan adalah senjata yang paling kuat dalam rangka mengubah dunia *education is the most powerful weapon which you can use to change the world* itulah kira-kira filsafat yang kami pakai kenapa kami mengedepankan dan menambah pemberantasan korupsi dengan upaya pendidikan masyarakat.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati

Kalau tadi ada yang bertanya kapan kira-kira Indonesia bermimpi untuk bebas dari korupsi sebagaimana rencana strategis KPK yang disusun 2019-2024 itupun diarahkan dalam rangka memberantas korupsi dan menyadarkan tindak pidana korupsi maka KPK mengedepankan dengan 3 pendekatan yang kami sebutkan tadi. Kami yakin 10 tahun kedepan KPK dan segenap anak bangsa memiliki keyakinan Indonesia bebas dari korupsi apabila pendidikan masyarakat dengan output banyaknya penyuluh anti korupsi, banyaknya insan-insan Indonesia, warga anak bangsa menjadi agen pembangun integritas. Jadi pendidikan dimaksudkan:

1. Menambah dan membangun penyuluh anti korupsi
2. Membangun agen
3. Membangun integritas

Kami laporkan pada forum ini bahwa sampai dengan sekarang tentu kita harus tingkatkan penyuluh anti korupsi karena sampai hari ini hanya terdapat 827 orang penyuluh anti korupsi begitu juga dengan agen pembangun integritas baru terdapat 68 orang. Kami berharap dan sungguh-sungguh berupaya kementerian lembaga pemerintahan provinsi kabupaten kota sampai ke pelosok Indonesia memiliki agen pembangun integritas dan memiliki penyuluh anti korupsi. Mudah-mudahan dengan dua sertifikasi tersebut akan menambah juga kredibilitas aparatur Pemerintah selayaknya sertifikasi guru yang mendapatkan perhatian dan *reward* karena memiliki sertifikasi guru begitu juga KPK anak bangsa memiliki spesifikasi penyuluh anti korupsi dan sertifikasi agen pembangun integritas.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati

Kami akan sampaikan juga bahwa program KPK dalam rangka pemberantasan korupsi sesungguhnya memiliki 2 program besar dalam sistem penganggaran. Pertama adalah program dukungan manajemen KPK dengan sumber anggaran kurang lebih Rp 868.073.101.000, yang kedua adalah program pemberantasan korupsi kurang lebih Rp 310.422.185.000 atau naik daripada tahun 2020 sebesar Rp 223.000.000.000 artinya kami yakini bahwa angka dalam rangka mengajukan memacu pemberantasan korupsi dengan program pemberantasan korupsi sudah lebih baik angka anggaran daripada tahun sebelumnya atau berkurang lebih naik Rp 87.000.000.000. ini sekaligus juga menjawab apa diajukan oleh Bapak-bapak yang terhormat Bapak Arsul Sani dari PPP. Selanjutnya juga program dukungan manajemen, dukungan PPM 5,1 miliar dan dukungan informasi data kurang lebih 73 miliar, dukungan sarana prasarana kurang lebih 47 miliar.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati

Selanjutnya perkenalkan kami ini menyampaikan program pendidikan masyarakat sebenarnya adalah program yang dilakukan oleh KPK tidak hanya sekedar sosialisasi budaya anti korupsi tetapi sekaligus juga kampanye mengajak seluruh anak-anak bangsa untuk tidak ingin korupsi.

Program pencegahan kita kedepankan dengan cara perbaikan sistem apakah isu sistem tata niaga, sistem reformasi biroksi, sistem penegakan hukum termasuk juga sistem Pilkada dan tentu kita pernah mendengar apa yang kita ajukan dan pernah kita sampaikan yaitu program politik berintegritas pendek kata program pendidikan masyarakat menyasar kepada seluruh anak bangsa melalui jaring pendidikan, menyasar seluruh anak bangsa melalui jalur penyelenggara negara, calon penyelenggara negara, para politisi dan rekan-rekan pengambil keputusan bidang politik dan pemangku kepentingan. ...(suara tidak jelas) sasaran untuk pendidikan masyarakat adalah kalangan dunia usaha melalui Badan Milik Usaha Negara, Badan Usaha Milik Daerah, maupun kalangan swasta. Tiga ini kita menjadikan sasaran pendidikan masyarakat karena sesungguhnya kita berharap tidak ada lagi yang ingin melakukan korupsi.

Selanjutnya kami izin menyampaikan terkait dengan dukungan anggaran tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sarifuddin Suding terkait tadi dengan besaran anggaran kami ingin menyampaikan kepada forum yang terhormat ini dukungan operasional Deputi penindakan sesungguhnya naik daripada sebelumnya karena sebelumnya 49,5 miliar sudah kita tambah sehingga sekarang menjadi Rp 65.881.289.000, begitu juga dengan dukungan anggaran karena koordinasi dan supervisi sebagaimana amanat Pasal 6B dan Pasal 6D yaitu melakukan koordinasi supervisi anggaran yang perlu kita naikkan dan angka 11.248.828.000 menjadi 24.103.165.000. tadi juga ada menyampaikan terkait dengan upaya ke operasional pencegahan dan monitoring ini adalah amanat Pasal 6A dan Pasal 6C semua anggarannya hanya 21,8 miliar sekarang kita tambah 81 sehingga total semuanya 105.139.731.000.

Tadi sebagaimana banyak Anggota Komisi III, Pimpinan Komisi III berhadapan bahwa kinerja KPK haruslah mendatangkan manfaat bagi rakyat untuk itu KPK sudah mengembangkan ...(suara tidak jelas) tata cara pencegahan korupsi yang kita kenal dengan *program Monitoring Center for Prevention (MCP)* atau pusat monitoring pencegahan. Melalui program MCP ada 8 program yang kami kembangkan tetapi pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan ada program dengan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan asli daerah dari program tersebut maka negara atau daerah sudah mendapatkan tambahan anggaran atau tambahan nilai pajak dari hotel dan restoran dan pajak lainnya pada semester 1 tahun 2020 sebesar 80,1 triliun dan KPK dalam upaya pencegahannya telah menyelamatkan potensi kerugian negara kurang lebih 10,84 triliun. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan, kemajuan, dan kecerdasan bangsa Indonesia.

Tentu ada yang bertanya kenapa sekarang OTT sepi jawabannya adalah belum ada jawaban pasti tetapi yang pasti adalah KPK terus melakukan kegiatan pendidikan masyarakat dan pencegahan dan kami pernah sampaikan setiap iklan layanan masyarakat, kampanye, pada masa pandemi Covid-19, pada masa bencana, tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa bencana ancaman hukumannya adalah pidana mati. Mudah-mudahan inilah yang menjadi catatan sehingga tidak terjadi korupsi namun

demikian berdasarkan fakta empiris sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 tindak pidana korupsi terjadi paling banyak adalah ditahun-tahun politik, yang tertinggi tindak pidana tahun politik adalah tahun 2018 kebetulan waktu itu kami sebagai Deputi Penindakan 30 kali kami melakukan tertangkap tangan dan 141 kepala Daerah yang terlibat baik itu Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tertinggi tahun 2014 sebanyak 22 Kepala Daerah yang terlibat tentu tahun ini adalah tahun kritis bagi kita karena kita menghadapi kedaruratan kesehatan, menghadapi pandemi Covid-19 dan juga menghadapi kedaruratan politik yang sebentar lagi akan datang pada 9 Desember 2020 dimana ada 270 Kepala Daerah yang mengikuti kontestansi Pilkada inipun tidak luput dari perhatian KPK.

Bapak-Bapak Anggota Komisi III DPR dan Pimpinan Komisi III DPR RI
Serta hadirin yang mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi, Kapolri, maupun Kejaksaan Agung dengan DPR RI

Kami ingin menyampaikan bahwa terima kasih kepada Komisi III yang telah memberikan tambahan anggaran kepada KPK dan kami berharap dan bertekad keras berkomitmen tetap melakukan pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan, pendidikan masyarakat, pencegahan koordinasi supervisi dan penindakan.

Demikian yang ingin kami sampaikan sebagai gambaran besar anggaran KPK 2021 dukungan manajemen sebesar Rp 868.000.000.000, dukungan pemberantasan korupsi Rp 310.422.000.000, pengadaan sarana prasarana ...(suara tidak jelas) KPK Rp 47.700.000.000, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat sebesar Rp 5.100.000.000, sarana pembangunan informasi data teknologi dan informasi KPK Rp 73.600.000.000. Demikian yang ingin kami sampaikan terima kasih, saya akhiri.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om shanti shanti shanti om*

KETUA RAPAT (Dr. Ir. ADIES KADIR, S.H., M.HUM.):

Baik, terima kasih Pak Ketua KPK kita telah mendengarkan penjelasan dan jawaban dari Mitra Kerja atas pertanyaan yang telah disampaikan Bapak Ibu Anggota Komisi III baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir virtual untuk acara selanjutnya mohon kesimpulan ditampilkan.

Bapak Ibu mitra kerja, sebelum ditampilkan kesimpulan saya menyampaikan informasi sesuai kesimpulan rapat Komisi III DPR RI pada tanggal 31 Agustus 2020 telah meminta telaahan PNB Polri dan Kejaksaan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, itu informasi kepada Mitra Kerja. Tolong diperjelas sedikit kesimpulannya:

Poin satu,

1. Komisi III DPR RI menyetujui Pagu anggaran tahun 2021 untuk:
 - a. Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp 9.593.319.486.000.

- b. Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp 112.125.251.565.000.
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp 1.305.075.256.000.
Poin satu bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Mitra Kerja setuju ya?
Baik.

- 2. Komisi III DPR RI akan menyampaikan persetujuan Pagu anggaran tahun 2021 tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditetapkan sebagai Pagu definitif dalam pengesahan RAPBN 2021.

Setuju? Mitra Kerja setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami muliakan

Dengan telah selesainya pembicaraan rapat pada hari ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja dan RDP pada hari ini. Apabila tidak ada yang perlu dibicarakan lagi rapat hari ini dapat kita akhiri dan kita tutup disertai dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Wakapolri, Bapak Ketua KPK dan Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi III. Atas nama Pimpinan kami ucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan dengan mengucapkan *alhamdulillah* rapat kami nyatakan ditutup. Terima kasih Pak JA, terima kasih Pak Wakapolri, Pak Ketua KPK.

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 13.22 WIB)

Jakarta, 21 September 2020

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001